



EKONOMI BIRU **UNTUK**
INDONESIA MAJU

KKP
2025
PROGETOGETHER

panganbiru

08
POVERTY GROWTH

LAPORAN KINERJA TAHUN 2025

STASIUN PSDKP TAHUNA



**DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) UPT Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta target kinerja Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2025. Sebagaimana amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja



Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Instansi Pemerintah serta bagian dari perwujudan transparansi dan akuntabilitas UPT Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam kaitannya dengan terselenggaranya *good governance*.

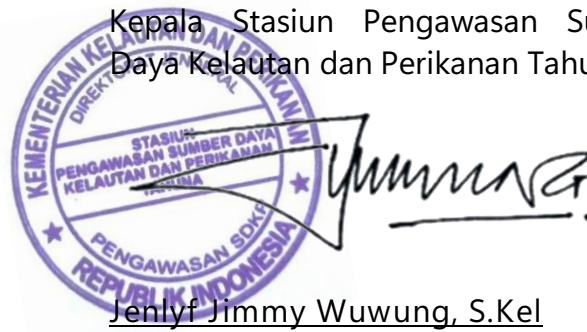
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2025 Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna memberikan gambaran terhadap semua capaian kinerja dan aktivitas kegiatan yang telah menjadi target pada tahun tersebut. Dalam Laporan Kinerja ini juga menjabarkan langkah-langkah tindak lanjut dalam rangka perbaikan capaian ke depan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Laporan ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan saran dan masukan dalam rangka perbaikan laporan ini di masa yang akan datang. Kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berperan aktif dalam penyusunan sehingga laporan kinerja ini dapat disusun dan diterbitkan.

Akhir kata, semoga Laporan ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja sekaligus tolak ukur peningkatan kinerja bagi pegawai Stasiun PSDKP Tahuna dan seluruh pihak terkait. Semoga motivasi yang telah dibangun dalam membangun kinerja pengawasan SDKP dapat terus ditingkatkan.

Tahuna, 19 Januari 2025

Kepala Stasiun Pengawasan Sumber
Daya Kelautan dan Perikanan Tahuna,

The image shows a circular official stamp in purple ink. The outer ring contains the text "KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN" at the top and "REPUBLIK INDONESIA" at the bottom, separated by two stars. The inner ring contains "DIREKTORAT PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN" at the top and "STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUNA" at the bottom. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink, which appears to be "Jenlyf Jimmy Wuwung".

Jenlyf Jimmy Wuwung, S.Kel

NIP. 19770415 200912 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Instansi Pemerintah, maka disusun Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2025 UPT Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna. LKj ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas terhadap kinerja UPT Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dan RKT tahun 2025.

Sebagaimana tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja, untuk tahun 2025 terdapat 7 Sasaran Kegiatan dan 19 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang harus dilaksanakan oleh UPT Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap kinerja yang akan dilaksanakan. Dari 19 IKK tersebut telah terbagi menjadi 9 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 10 Indikator Kinerja Manajerial (IKM).

Hasil pengukuran capaian kinerja UPT Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna Tahun 2025 diperoleh Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan sebesar 105,68% dengan predikat "Baik". Delapan SK tersebut antara lain: SK.1 Terselenggaranya Intelijen Kelautan dan Perikanan Secara Efektif, SK.2 Terselenggaranya Pengawasan Sumber Daya Kelautan, SK.3 Terselenggaranya Pengawasan Sumber Daya Perikanan, SK.4 Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP Secara Efektif, SK.5 Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan yang Efektif dan Sesuai Ketentuan, SK.6 Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Efektif dan Sesuai Ketentuan, dan SK.7 Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Lincah dan Akuntabel dalam Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan .

Alokasi anggaran Stasiun Pengawasan SDKP Tahun TA. 2025 sebesar Rp. 13.937.135.000,- dengan pagu Real sebesar Rp. 12.690.766.000,- dan Realisasi Anggaran (Pagu Real) pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 12.659.396.766,- dengan persentase capaian sebesar 99,75%.

Melalui Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2025 ini, diharapkan menjadi bahan masukan untuk perbaikan kinerja di triwulan berikutnya sehingga target kinerja yang telah ditetapkan dalam RKT dan dokumen Perjanjian Kinerja dapat tercapai sepenuhnya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan	1
C. Isu Aktual pada Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	2
D. Tugas dan Fungsi Stasiun PSDKP Tahuna.....	5
E. Sistematika Penyajian.....	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
A. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 – 2029.....	11
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	14
C. Pengukuran Capaian Kinerja	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	20
A. Capaian Kinerja Pembangunan Kelautan dan Perikanan Bidang Pengawasan SDKP Tahun 2025.....	20
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	22
C. Akuntabilitas Sumber Daya Manusia dan Keuangan.....	92
BAB IV PENUTU	96
A. Kesimpulan	96
B. Rekomendasi	97

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Daftar Armada Pendukung Kegiatan Pengawasan Stasiun PSDKP Tahuna	9
Tabel 2	Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Tahuna Tahun 2025	14
Tabel 3	Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2025 Stasiun PSDKP Tahuna	20
Tabel 4	Nilai Kualitas Operasi Intelijen Kelautan	23
Tabel 5	Hasil Capaian ISK.1 "Nilai Kualits Operasi Intelijen Kelautan" Tahun 2025	23
Tabel 6	Target Kinerja Komponen ISK.2 "Indeks Pemeriksaan Pelaku Usaha Kelautan"	27
Tabel 7	Hasil Capaian ISK.2 "Indeks Kualitas Pengawasan Sumber Daya Kelautan" Tahun 2025	27
Tabel 8	Pelaku Usaha Perikanan dan Non Perikanan dalam Pengelolaan Limbah yang Diperiksa Kepatuhannya Tahun 2025	29
Tabel 9	Pelaku Usaha Pemanfaat Jenis Ikan yang Dilindungi yang Diperiksa Kepatuhannya Tahun 2025	31
Tabel 10	Pelaku Usaha Pemanfaat Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Ruang Laut yang Diperiksa Kepatuhannya Tahun 2025	33
Tabel 11	Pelaku Usaha Perikanan Terhadap Ketentuan Pelanggaran Destructive Fishing yang Diperiksa Kepatuhannya Tahun 2025	38
Tabel 12	Target ISK.3 "Nilai Kualitas Pengawasan Sumber Daya Perikanan"	41
Tabel 13	Hasil Capaian ISK.3 "Nilai Kualitas Pengawasan Sumber Daya Perikanan" Tahun 2025	41

Tabel 14	Pemeriksaan Kepatuhan Subsektor Pengolahan Ikan Lingkup Stasiun PSDKP Tahuna”	44
Tabel 15	Target ISK.4 “Indeks Operasi Kapal Pengawas”	47
Tabel 16	Hasil Capaian ISK.4 “Indeks Operasi Kapal Pengawas” Tahun 2025	47
Tabel 17	Perhitungan Capaian ISK.4 “Indeks Operasi Kapal Pengawas” Tahun 2025	48
Tabel 18	Target ISK.5 “Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas	51
Tabel 19	Hasil Capaian ISK.5 “Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas” Tahun 2025	52
Tabel 20	Perhitungan “Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas” Tahun 2025	52
Tabel 21	Target ISK.6 “Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Prasarana dan Sarana Pengawasan SDKP	56
Tabel 22	Hasil Capaian ISK.6 “Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Prasarana dan Sarana Pengawasan SDKP	56
Tabel 23	Target ISK.7 “Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan” Tahun 2025	58
Tabel 24	Hasil Capaian ISK.7 “Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan” Tahun 2025	58
Tabel 25	Target ISK.8 “ Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan”	60
Tabel 26	Hasil Capaian ISK.8 “ Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan” Tahun 2025	60
Tabel 27	Data Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan” Tahun 2025	62

Tabel 28	Target ISK.9 "Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan"	63
Tabel 29	Hasil Capaian ISK.9 "Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan" Tahun 2025	64
Tabel 30	Total Kasus TPKP yang Dilaksanakan Pada Tahun 2025	64
Tabel 31	Target ISK.10 "Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker Stasiun PSDKP Tahuna"	70
Tabel 32	Hasil Capaian ISK.10 "Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker Stasiun PSDKP Tahuna"	70
Tabel 33	Target ISK.11 "Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PSDKP Tahuna"	72
Tabel 34	Hasil Capaian ISK.11 "Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PSDKP Tahuna" Tahun 2025	72
Tabel 35	Target ISK.12 "Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PSDKP Tahuna" Tahun 2025	74
Tabel 36	Hasil Capaian ISK.12 "Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PSDKP Tahuna" Tahun 2025	74
Tabel 37	Target ISK.13 "Penilaian Mandiri SAKIP Stasiun PSDKP Tahuna" Tahun 2025	76
Tabel 38	Hasil Capaian ISK.13 "Penilaian Mandiri SAKIP Stasiun PSDKP Tahuna" Tahun 2025	77
Tabel 39	Target ISK.14 "Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Lingkup Stasiun PSDKP Tahuna"	78
Tabel 40	Hasil Capaian ISK.14 "Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Lingkup Stasiun PSDKP Tahuna" Tahun 2025	79
Tabel 41	Target ISK.15 "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Stasiun PSDKP Tahuna yang	

	Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan”	80
Tabel 42	Hasil Capaian ISK.15 “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Stasiun PSDKP Tahuna yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan” Tahun 2025	81
Tabel 43	Target ISK.16 “Nilai Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik Unit Kerja Stasiun PSDKP Tahuna”	83
Tabel 44	Hasil Capaian ISK.16 “Nilai Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik Unit Kerja Stasiun PSDKP Tahuna” Tahun 2025	83
Tabel 45	Target ISK.17 “Nilai Pengawasan Kearsipan internal Stasiun PSDKP Tahuna”	85
Tabel 46	Hasil Capaian ISK.17 “Nilai Pengawasan Kearsipan internal Stasiun PSDKP Tahuna” Tahun 2025	85
Tabel 47	Target ISK.18 “Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan Stasiun PSDKP Tahuna”	87
Tabel 48	Hasil Capaian ISK.18 “Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan Stasiun PSDKP Tahuna” Tahun 2025	87
Tabel 49	Target ISK.19 “Nilai Implementasi Program Budaya Kerja” ...	89
Tabel 50	Hasil Capaian ISK.19 “Nilai Implementasi Program Budaya Kerja” Tahun 2025	90
Tabel 51	Komposisi Golongan dan Kualitas Pendidikan ASN Stasiun PSDKP Tahuna	92
Tabel 52	Daftar PJLP di UPT Stasiun PSDKP Tahuna	92
Tabel 53	Rincian Realisasi Anggaran Tahun 2025 Stasiun PSDKP Tahuna	93
Tabel 54	Tindak Lanjut Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2025	97

Tabel 55	Rekomendasi Penutup dan Rencana Tindak Lanjut Laporan Kinerja Tahun 2025	97
----------	--	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi Stasiun PSDKP Tahuna	6
Gambar 2	Kantor Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna, Satwas SDKP Kpl. Talaud dan Wilker Salibabu	8
Gambar 3	Tampilan Awal dan Pengukuran Kinerja Pada Kinerjaku	19
Gambar 4	Pengawasan Usaha Perikanan dan Non Perikanan dalam Pengelolaan limbah Tahun 2025	31
Gambar 5	Pengawasan Jenis Ikan yang Dilindungi Tahun 2025	33
Gambar 6	Pengawasan Pelaku Usaha Perikanan Terhadap Ketentuan Pelanggaran Destructive Fishing (Selain OSS) Tahun 2025..	39
Gambar 7	Perbandingan Capaian “Kualitas Pengawasan Sumber Daya Kelautan” Tahun 2025 dengan UPT Sejenis	39
Gambar 8	Perbandingan Capaian “Kualitas Pengawasan Sumber Daya Perikanan” Tahun 2025 dengan UPT Sejenis	45
Gambar 9	Perbandingan Capaian “Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas” Tahun 2025 dengan UPT Sejenis	50
Gambar 10	Kegiatan Operasi Kapal Pengawas Tahun 2025	50
Gambar 11	Perbandingan Capaian “Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas” Tahun 2025 dengan UPT Sejenis	54
Gambar 12	Kegiatan Operasi Kapal Pengawas Tahun 2025	55
Gambar 13	Perbandingan Capaian “Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan” Tahun 2025 dengan UPT Sejenis	59
Gambar 14	Perbandingan Capaian “Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan” dengan UPT Sejenis Tahun 2025	62
Gambar 15	Perbandingan Capaian “Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan” dengan UPT Sejenis Tahun 2025	68

Gambar 16	Kegiatan TPKP pada Tahun 2025	56
Gambar 17	Perbandingan Capaian “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan dengan UPT Sejenis Tahun 2025	82
Gambar 18	Perbandingan Capaian “Nilai Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik ” dengan UPT Sejenis Tahun 2025	84
Gambar 19	Perbandingan Capaian “Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan pada Unit Kerja Stasiun PSDKP Tahuna” dengan UPT Sejenis Tahun 2025	88
Gambar 20	Perbandingan Capaian “Nilai Implementasi Program Budaya Kerja” dengan UPT Sejenis Tahun 2025	91

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja (LKj) UPT Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna Tahun 2025 merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah desiminasi informasi capaian kinerja dalam satu tahun anggaran berdasarkan komitmen yang telah ditetapkan sebelumnya. Laporan Kinerja ini bertujuan untuk dapat menginformasikan kegiatan-kegiatan yang menjadi fokus UPT Stasiun Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahuna untuk mencapai target kinerja yang telah disusun dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Instansi Pemerintah dimana aturan tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk membuat elemen tersebut sehingga dapat mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan dalam rangka menuju perwujudan "*good governance*".

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025 Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna adalah untuk mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan Sasaran Kegiatan sepanjang Tahun 2025 kepada para *stakeholder* guna mewujudkan akuntabilitas kepada pihak-pihak yang memberi mandat atau amanah. Laporan ini merupakan perwujudan salah satu kewajiban untuk menjawab (*obligation to answer*) tentang apa yang sudah diamanatkan kepada

UPT Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna. Dengan demikian LKj ini merupakan sarana untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang sudah dicapai selama dan bagaimana proses pencapaiannya berkaitan dengan mandat yang telah diterima.

2. Tujuan

Tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari penerapan manajemen kinerja UPT Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna dari tahun sebelumnya dan memperbaiki kinerja kearah lebih baik dimasa mendatang, yang dimulai dari proses perencanaan secara benar, pelaksanaan dan evaluasinya.

C. Isu Aktual pada Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki 5 Strategi Ekonomi Biru sebagai Langkah Indonesia menjaga ketahanan pangan dunia antara lain :

1. Target perluasan kawasan konservasi 30% dari seluruh wilayah perairan Indonesia;
2. Penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur (PIT) berbasis kuota berdasarkan zonasi;
3. Pengembangan budidaya untuk mendorong nelayan-nelayan di zona penangkapan terukur agar dapat beralih pada budidaya yang berkelanjutan dan ramah lingkungan;
4. Menjamin wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terjaga dengan baik;
5. Program "Bulan Cinta Laut" dengan membersihkan laut dari sampah di seluruh wilayah perairan Indonesia dan melibatkan nelayan lokal.

Guna mendukung program tersebut, Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna sebagai salah satu unit kerja dibawah Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan melakukan pengawasan terhadap beberapa isu terkini yang dijadikan perhatian dalam pemanfaatan SDKP, yaitu:

1. Subsektor Penangkapan Ikan

- Tren kasus IUU Fishing oleh KIA di perairan wilayah kerja Stasiun PSDKP Tahuna pada tahun 2025 sebanyak 8 kasus;
- Pengawasan Kelautan dan Perikanan di wilayah perbatasan RI – Filipina;
- Penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur dalam rangka pencapaian target PNBPN sektor kelautan dan perikanan;
- Potensi pelanggaran daerah penangkapan ikan yang dilakukan oleh KII;
- Kuota Penangkapan dalam Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan rajungan (*Portunus spp.*) di Wilayah Negara Republik Indonesia.

2. Subsektor Pembudidayaan Ikan

- Belum adanya unit budidaya ikan yang terdaftar/terregistrasi dalam Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
- Limbah budidaya ikan yang dihasilkan dan potensi dampak terhadap lingkungan sekitar;
- Penggunaan pakan dan obat ikan yang tidak terdaftar dalam register;
- Kegiatan pembudidayaan dan pengelolaan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan rajungan (*Portunus spp.*) di Wilayah Negara Republik Indonesia.

3. Subsektor Pengolahan Hasil Perikanan

- Banyaknya unit pengolahan ikan yang tidak terdaftar/terregistrasi dalam Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;

- Belum adanya sertifikasi HACCP dan SKP dalam Unit Pengolahan yang terperiksa;
 - Penggunaan bahan tambahan pangan (BTP) yang berbahaya;
 - Kegiatan pengolahan ikan yang tidak sesuai dengan standar GMP dan SSOP.
4. Subsektor Pengangkutan dan Pemasaran Ikan
- Belum adanya pelaku usaha pengangkutan dan pemasaran ikan yang terdaftar/terregistrasi dalam Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
 - Kegiatan lalu lintas Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) di Wilayah Negara Republik Indonesia;
 - Potensi tindak pidana penyelundupan pada kegiatan Lalu Lintas Produk Perikanan Tertentu (Benih Bening Lobster).
5. Pencemaran Perairan
- Potensi pencemaran perairan yang disebabkan oleh limbah hasil kegiatan perikanan maupun non perikanan.
6. Kegiatan Penangkapan Ikan yang Merusak (*Destructive Fishing*)
- Kegiatan perikanan yang bersifat merusak habitat serta kelestariannya, seperti penangkapan ikan yang melebihi batas potensi lestariannya (*over fishing*), penggunaan bahan peledak dan bahan beracun, penggunaan kompresor pada kegiatan penangkapan ikan, serta penyetruman ikan.
7. Pemanfaatan Ikan yang Dilindungi
- Kurangnya pengetahuan masyarakat terkait ikan serta biota laut yang dilarang, dilindungi dan dibatasi dalam pemanfaatannya;
 - Terdapat beberapa spesies ikan dan biota laut yang minim

populasinya dan terancam punah.

8. Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

- Pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang tidak memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia;
- Penguasaan pulau-pulau kecil oleh pihak lain (perseorangan dan swasta) baik berupa PMA/PMDN yang diharuskan melalui mekanisme perizinan;
- Potensi kerusakan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta ruang laut dampak dari kegiatan pemanfaatannya;
- Kegiatan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta ruang laut yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

D. Tugas dan Fungsi Stasiun PSDKP Tahuna

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, UPT Stasiun PSDKP Tahuna menyelenggarakan beberapa fungsi yaitu:

- a) Penyusunan rencana, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, serta laporan;
- b) Pelaksanaan operasional pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- c) Pelaksanaan penyiapan logistik dan pemeliharaan Kapal Pengawas

Perikanan;

- d) Pelaksanaan penanganan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- e) Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengawasan; dan
- f) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

2. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi organisasi yang telah ditetapkan, perlu dilakukan pembagian tugas dan kewenangan yang digambarkan dalam struktur organisasi. Dalam pelaksanaan tugasnya, Kepala Stasiun didukung dengan 5 Ketua Tim Kerja (Katimja) serta Kelompok Jabatan Fungsional, dimana masing-masing mempunyai tugas dan kewenangan seperti diuraikan dibawah ini :

Gambar 1
Struktur Organisasi Stasiun PSDKP Tahuna



- a) Kepala Stasiun :

Merumuskan kebijakan operasional, mengkoordinasikan, mengarahkan dan melaksanakan manajerial dibidang pengawasan sumber daya

kelautan dan perikanan serta melakukan pembinaan kepada bawahan di lingkungan UPT Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahuna untuk mencapai kelancaran pelaksanaan tugas.

b) Katimja Dukungan Manajerial :

Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan anggaran serta pengelolaan urusan administrasi keuangan, barang kekayaan milik negara, kepegawaian dan jabatan fungsional, persuratan, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga.

c) Katimja Prasarana, Sarana dan Operasional Kapal Pengawas :

Melakukan pelaksanaan operasional dan penyiapan logistik kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, pemeliharaan sarana dan prasarana pengawasan, perencanaan dan pengembangan pengawakan kapal pengawas.

d) Katimja Intelijen dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan :

Mengkoordinir kegiatan pengawasan sumber daya perikanan mulai dari perencanaan, evaluasi, dokumentasi, pengumpulan informasi dan pelaporan.

e) Katimja Intelijen dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan :

Mengkoordinir kegiatan pengawasan sumber daya kelautan mulai dari perencanaan, evaluasi, dokumentasi, pengumpulan informasi dan pelaporan.

f) Katimja Penanganan Pelanggaran

Mengkoordinir kegiatan penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan dan sanksi administratif mulai dari perencanaan, evaluasi, dokumentasi, informasi dan pelaporan.

g) Kelompok Jabatan Fungsional :

Melaksanakan kegiatan sesuai dengan pembagian tim kerja dan fungsi masing-masing jabatan fungsional, serta melaksanakan tugas kedinasan sesuai dengan arahan Pimpinan dan Katimja.

Untuk mendukung terlaksananya kegiatan pengawasan SDKP secara baik sampai ke daerah, maka telah di bentuk Satuan Pengawasan dan Wilayah Kerja PSDKP di bawah koordinasi UPT Stasiun PSDKP Tahuna, yang meliputi 1 Satwas SDKP (Satwas SDKP Talaud) dan 1 Wilker PSDKP (Wilker Salibabu).

Gambar 2
Kantor Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna, Satwas SDKP Kpl. Talaud dan Wilker PSDKP Salibabu



Stasiun PSDKP Tahuna






Satwas SDKP Talaud



Wilker PSDKP Salibabu

Selain itu untuk mendukung kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, Stasiun PSDKP Tahuna dibekali dengan armada pengawasan berupa 1 Unit Kapal Pengawas KP. Hiu 15 dan 2 Unit Speedboat Pengawasan Napoleon 039 di bawah kendali Stasiun PSDKP Tahuna dan Speedboat Napoleon 017 dibawah kendali Satwas SDKP Talaud.

Tabel 1 Daftar Armada Pendukung Kegiatan Pengawasan Stasiun PSDKP Tahuna

Foto Kapal	Nama Kapal	Bahan Kapal	Tahun Pembuatan	Gross Tonnage	Jumlah Awak Kapal
	KP. Hiu 15 Length Of All (LOA) 32, 10 Meter	Alluminium Alloy	2015	153 GT	13 Orang
	Speedboat Napoleon 039 Length Of All (LOA) 12 Meter	Fiber - Reinford Plastic	2015	15 GT	10 Orang
	Speedboat Napoleon 017 Length Of All (LOA) 12 Meter	Fiber - Reinford Plastic	2012	15 GT	10 Orang

E. Sistematika Penyajian

Sistem Penyajian LKj Tahun 2025 UPT Stasiun PSDKP Tahuna, secara garis besar diuraikan sebagai berikut :

1. Bab I. Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas tentang latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan LKj, tugas dan fungsi organisasi data umum organisasi UPT Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna.

2. Bab II. Perencanaan Kinerja

Menjelaskan secara ringkas tentang Rencana Strategis Ditjen PSDKP untuk Periode 2024-2029 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

3. Bab III. Akuntabilitas Kinerja

Menjelaskan uraian hasil pengukuran Kinerja, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan.

4. Bab IV. Penutup

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari LKj Tahun 2025 Stasiun Pengawasan SKP Tahuna dan rekomendasi perbaikan kinerja di masa mendatang.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) berpedoman pada dokumen perencanaan terdiri dari: (1) Renstra Ditjen, PSDKP 2024-2029; (2) Rencana Kerja Tahun 2025; dan (3) Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang telah disempurnakan dengan pendekatan sistem pengelolaan kinerja berbasis Balance Score Cards (BSC).

A. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 – 2029

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal PSDKP 2024 – 2029 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai tugas dan fungsi yang diamanatkan. Renstra tersebut disusun selaras dengan arah kebijakan strategis nasional bidang kelautan dan perikanan sebagaimana tertuang dalam arah kebijakan KKP 2024 – 2029. Renstra disusun dengan menggunakan evaluasi renstra periode sebelumnya, asumsi yang dipertanggungjawabkan serta kombinasi pendekatan *bottom up* dan *top down* dengan keterlibatan Eselon I, Eselon II, Eselon III dan Eselon IV lingkup Direktorat Jenderal PSDKP. Pendekatan *top down* mengandung makna bahwa perencanaan ini memperhatikan pula ketersediaan anggaran sesuai dengan estimasi APBN. Sedangkan pendekatan *bottom up* dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan pendanaan guna mewujudkan kondisi ideal.

Secara ringkas arah kebijakan Direktorat Jenderal PSDKP tahun 2024 – 2029 untuk mendukung Sasaran Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, diuraikan sebagai berikut:

1. Pengembangan SDM Aparatur Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang berkualitas dan berdaya saing;
2. Peningkatan kapasitas sarana, prasarana dan kelembagaan pengawasan SDKP;
3. Penguatan sinergi dengan penegak hukum di laut (TNI AL, POLRI, Bakamla);
4. Peningkatan komunikasi dengan stakeholder dan pelaku usaha kelautan dan perikanan;
5. Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP.

Bedasarkan arah kebijakan pengawasan SDKP tersebut, ditetapkan Sasaran Kegiatan pencapaian dengan program kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan. Sasaran Kegiatan tersebut digunakan juga untuk penyusunan rencana kerja dan perjanjian kinerja Ditjen PSDKP.

Arah kebijakan pengawasan SDKP tentunya harus ditindaklanjuti dan diterjemahkan pada kegiatan yang dilaksanakan pada setiap Satker dalam sasaran kegiatannya. Sasaran kegiatan tersebut diatas dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pengembangan SDM Aparatur Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkualitas dan berdaya saing, dengan cara:
 - a. Membangun budaya kerja Direktorat Jenderal PSDKP;
 - b. Mengembangkan kompetensi SDM Aparatur PSDKP
 - c. Membangun pola karir PNS Direktorat Jenderal PSDKP;
 - d. Meningkatkan jumlah dan sebaran SDM Aparatur PSDKP.
2. Peningkatan kapasitas teknologi pemantauan, sarana, prasarana dan kelembagaan pengawasan SDKP, dengan cara;
 - a. Membangun sarana pengawasan (kapal pengawas, *speed boat* dan sarana pengawasan lainnya);
 - b. Membangun prasarana pengawasan yang memadai;

- c. Meningkatkan pemeliharaan kapal pengawas agar siap operasional;
 - d. Mengembangkan kelembagaan pengawasan.
3. Penguatan sinergi dengan penegak hukum (TNI AL, POLRI, Bakamla, Bea Cukai, Kejaksaan Agung dan instansi terkait lainnya), dengan cara:
- a. Operasi bersama pengawasan di laut dan di darat (TNI AL, POLRI, Bakamla, Bea Cukai, KLHK)
 - b. Pertukaran data/informasi (intelijen, operasi)
 - c. Penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan (Kejaksaan Agung);
 - d. Peningkatan kapasitas SDM Pengawasan;
 - e. Forum Koordinasi Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TNI AL, POLRI, Bakamla dan Kejaksaan Agung).
4. Peningkatan komunikasi dengan *stakeholder* dan pelaku usaha kelautan dan perikanan, dengan cara:
- a. Memperkuat sinergitas dan harmonisasi pengawasan SDKP dengan Pemerintah Daerah serta lintas sektor di lingkaran Pusat;
 - b. Memelihara komitmen bersama dengan lembaga internasional dan regional dalam pemberantasan IUU fishing;
 - c. Menjalankan alur pendekatan pengawasan secara komprehensif, yakni: pencegahan (*preventif*), pembinaan, penegakan hukum dengan pendekatan sanksi pidana sebagai pilihan terakhir (*ultimum remedium*);
 - d. Menerapkan metode *auditing* dalam pengawasan SDKP yang mengedepankan upaya perbaikan berkelanjutan terhadap temuan ketidaksesuaian bagi para pelaku usaha kelautan dan perikanan.
5. Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP, dengan cara:
- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab;

- b. Pemberian pemahaman kepada nelayan untuk tidak melintas batas ke perairan negara lain;
- c. Optimalisasi peran serta masyarakat dalam mendukung pengawas SDKP melalui POKMASWAS;
- d. Menanamkan pengetahuan pengelolaan SDKP yang bertanggung jawab sejak dini melalui "PSDKP Mengajar";
- e. Meningkatkan peran aktif pemuda melalui "Pemuda Pelopor Pengawasan";
- f. Memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Pokmaswas yang berkontribusi besar;
- g. Membuat inovasi dalam pelayanan publik.

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Stasiun PSDKP Tahuna secara khusus memiliki Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan terkait dengan target kinerja pada tahun 2025. Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil. Maka sesuai jenjang hierarki, UPT Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna diberi amanah oleh Direktorat Jenderal PSDKP untuk menjalankan tugas sesuai penetapan kinerja.

Tabel 2 Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Tahuna Tahun 2025 (Awal)

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
SK.1	Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif	1.	Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen kelautan [Nilai]	75
SK.2	Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan	2.	Indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan [Indeks]	100
SK.3	Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan	3.	Indeks pemeriksaan pelaku usaha perikanan [Indeks]	100

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
SK.4	Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif	4.	Indeks operasi kapal pengawas [Indeks]	92
		5.	Indeks operasi speedboat pengawas [Indeks]	92
SK.5	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	6.	Persentase pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan SDKP [Persentase]	100
SK. 6	Terselenggaranya penanganan pelanggaran administratif bidang kelautan dan perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	7.	Indeks penganan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan [Indeks]	81
SK. 7	Terselenggaranya penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	8.	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan [indeks]	94
SK. 8	Tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	9.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker Stasiun PSDKP Tahuna [Nilai]	71,5
		10.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker lingkup Stasiun PSDKP Tahuna [Nilai]	92
		11.	Indeks Profesionalitas ASN Stasiun PSDKP Tahuna [Indeks]	81
		12.	Penilaian Mandiri SAKIP Satker Stasiun PSDKP Tahuna [Nilai]	86
		13.	Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis Manajemen Risiko unit kerja lingkup Stasiun PSDKP Tahuna [Persentase]	100
14.	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan unit kerja lingkup Stasiun PSDKP Tahuna yang dokumen tindaklanjutnya	95		

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		telah dilengkapi dan disampaikan [Persentase]	
		15. Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik unit kerja lingkup Stasiun PSDKP Tahuna [Nilai]	88,5
		16. Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) unit kerja lingkup Stasiun PSDKP Tahuna [Nilai]	80
		17. Nilai pengawasan kearsipan internal Stasiun PSDKP Tahuna [Nilai]	80
		18. Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Stasiun PSDKP Tahuna [Unit]	1
		19. Nilai implementasi Program Budaya Kerja [Nilai]	70

Tabel 3 Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Tahuna Tahun 2025 (Revisi Desember)

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
SK.1	Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif	1. Nilai kualitas operasi intelijen kelautan [Nilai]	100
SK.2	Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan	2. Nilai kualitas pengawasan pelaku usaha kelautan [Nilai]	82
SK.3	Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan	3. Nilai kualitas pengawasan pelaku usaha perikanan [Nilai]	82
SK.4	Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP	4. Indeks operasi kapal pengawas [Indeks]	92

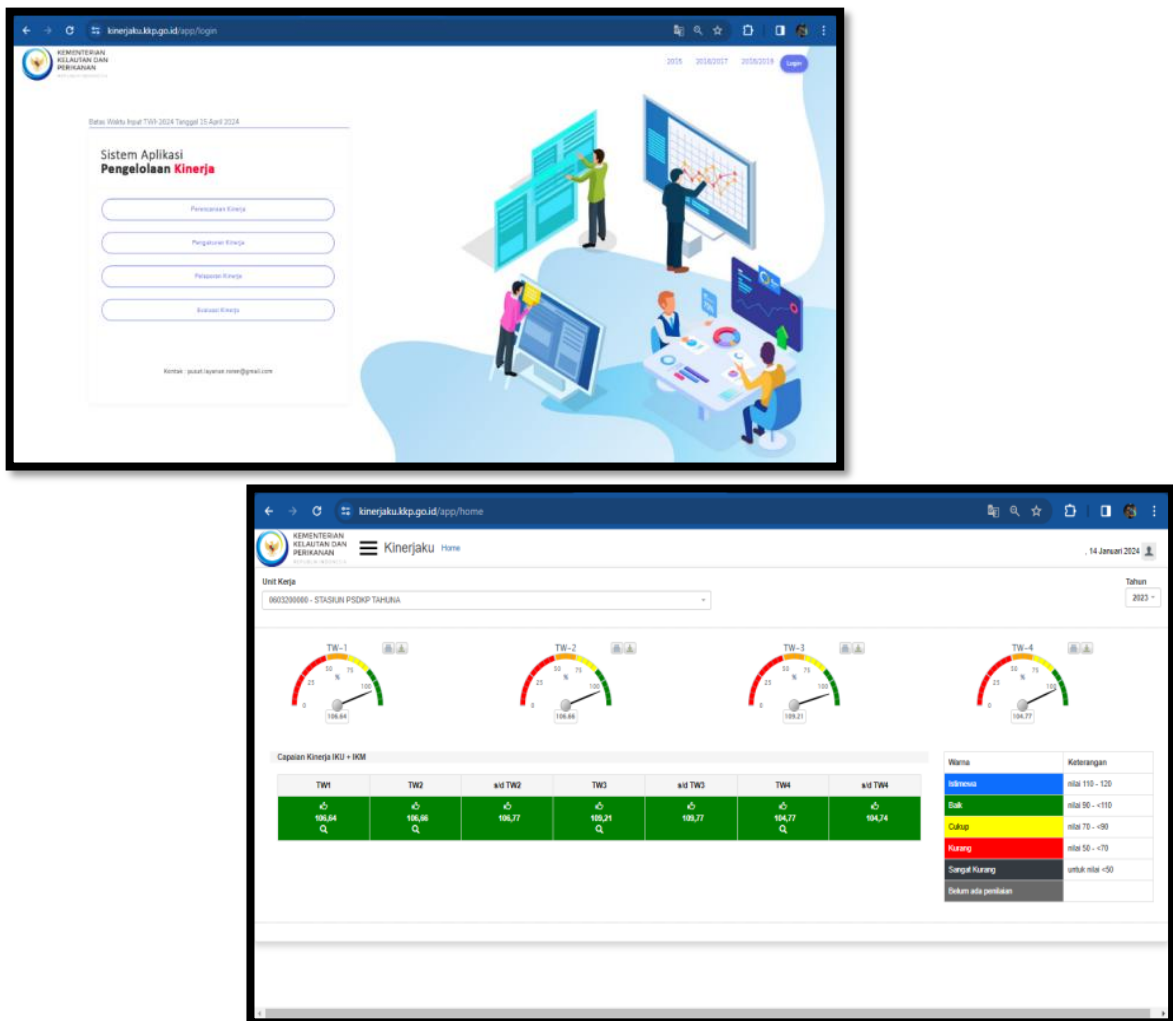
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
	secara efektif	5.	Indeks operasi speedboat pengawas [Indeks]	92
		6.	Persentase pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan SDKP [Persentase]	100
SK. 5	Terselenggaranya penanganan pelanggaran administratif bidang kelautan dan perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	7.	Indeks penerapan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan [Indeks]	81
		8.	Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan [Indeks]	81
SK. 6	Terselenggaranya penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	9.	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan [indeks]	81
SK. 7	Tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	10.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker Stasiun PSDKP Tahuna [Nilai]	71,5
		11.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker lingkup Stasiun PSDKP Tahuna [Nilai]	92
		12.	Indeks Profesionalitas ASN Stasiun PSDKP Tahuna [Indeks]	81
		13.	Penilaian Mandiri SAKIP Satker Stasiun PSDKP Tahuna [Nilai]	86
		14.	Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis Manajemen Risiko unit kerja lingkup Stasiun PSDKP Tahuna [Persentase]	100
		15.	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan unit kerja lingkup Stasiun PSDKP Tahuna yang dokumen tindaklanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan [Persentase]	95

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		16. Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik unit kerja lingkup Stasiun PSDKP Tahuna [Nilai]	80
		17. Nilai pengawasan kearsipan internal Stasiun PSDKP Tahuna [Nilai]	75
		18. Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Stasiun PSDKP Tahuna [Unit]	77
		19. Nilai implementasi Program Budaya Kerja [Nilai]	70

C. Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran tingkat capaian IKU dilakukan dengan berpedoman pada formula penghitungan yang telah ditetapkan dalam manual IKU. Selanjutnya nilai capaian tersebut dihitung dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala melalui penyusunan laporan kinerja yang didukung dengan implementasi pada Aplikasi *Kinerjaku* yang merupakan aplikasi berbasis informasi teknologi.

Gambar 3
Tampilan Awal dan Pengukuran Kinerja pada Kinerjaku



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Pembangunan Kelautan dan Perikanan Bidang Pengawasan SDKP Tahun 2025







Stasiun PSDKP Tahuna pada akhir Tahun 2025 mendapatkan skor kinerja sebesar 105,68% dengan ditunjukkan pada indikator yang berwarna hijau pada aplikasi *Kinerjaku* dengan predikat "Baik". Stasiun PSDKP Tahuna tetap mempertahankan tren positif dalam perolehan capaian kinerja dengan mendapatkan capaian >100% seperti tahun sebelumnya. Secara terperinci dan spesifik capaian kinerja Stasiun PSDKP Tahuna pada Tahun 2025 dapat dijelaskan melalui penjabaran informasi sebagai berikut:

1) Capaian Indikator Kinerja Utama Pengawasan SDKP Tahun 2025






Capaian Indikator Kinerja Utama Stasiun PSDKP Tahuna Tahun 2025 ditabulasikan pada Tabel 3. dibawah ini.







Tabel 3 Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2025 Stasiun PSDKP Tahuna

Stasiun PSDKP Tahuna	Level II
Jenlyf Jimmy Wuwung, S.Kel	Periode Tahun 2025
19770415 200912 1 001	105,68%
Plt. Kepala Stasiun PSDKP Tahuna	

Sasaran Kegiatan / Indikator Sasaran Kinerja	Target Tahun 2025	Capaian Tahun 2025	%	Status
SK.1 Terselenggaranya Intelijen Kelautan dan Perikanan Secara Efektif			100,00	
IK.1 Nilai kualitas operasi intelijen kelautan (Nilai)	100,00	100,00	100,00	
SK.2 Terselenggaranya Pengawasan Sumber Daya Kelautan			120,00	
IK.2 Nilai kualitas pengawasan sumber daya kelautan (Nilai)	82,00	100,00	100,00	
SK.3 Terselenggaranya Pengawasan Sumber Daya Perikanan			120,00	
IK.3 Nilai kualitas pengawasan	82,00	100,00	120,00	

sumber daya perikanan (Nilai)				
SK.4 Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP Secara Efektif			100,00	●
IK.4 Indeks operasi kapal pengawas (Indeks)	92,00	96,80	105,22	●
IK.5 Indeks operasi speedboat pengawas (Indeks)	92,00	97,50	105,98	●
IK.6 Persentase pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan SDKP (%)	100,00	100,00	100,00	●
SK.5 Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan yang Efektif dan Sesuai Ketentuan			100,00	●
IK.7 Indeks Pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (Indeks)	81,00	81,00	100,00	●
IK.7 Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (indeks)	81,00	81,00	100,00	●
SK.6 Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Efektif dan Sesuai Ketentuan			87,65	●
IK.8 Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan (Indeks)	81,00	71,00	87,65	●
SK.7 Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Lincah dan Akuntabel dalam Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan			108,93	●
IK.10 Nilai kinerja perencanaan anggaran satker Stasiun PSDKP Tahuna (Nilai)	71,50	84,16	117,71	●
IK.11 Indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) satker lingkup Stasiun PSDKP Tahuna (Nilai)	92,00	95,41	103,71	●
IK.12 Indeks profesionalitas ASN Stasiun PSDKP Tahuna (Indeks)	81,00	84,59	104,43	●
IK.13 Penilaian mandiri SAKIP satker Stasiun PSDKP Tahuna (Nilai)	86,00	88,90	103,37	●
IK.14 Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis Manajemen Risiko unit kerja lingkup Stasiun	100,00	100,00	100,00	●

PSDKP Tahuna (%)				
IK.15 Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan unit kerja lingkup Stasiun PSDKP Tahuna yang dokumen tindaklanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	95,00	100,00	105,26	
IK.16 Nilai kepuasan masyarakat pengguna layanan publik unit kerja lingkup Stasiun PSDKP Tahuna (Nilai)	80,00	92,55	116,19	
IK.17 Nilai pengawasan kearsipan internal Stasiun PSDKP Tahuna (Nilai)	75,00	87,50	116,67	
IK.18 Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Stasiun PSDKP Tahuna (Unit)	77,00	79,73	103,55	
IK.19 Nilai implementasi program budaya kerja (Nilai)	70,00	81,20	116,00	

Penjelasan warna:  Istimewa (Nilai 110-120)  Baik (Nilai 90 - <110)  Cukup (Nilai 70 - <90)  Kurang (Nilai 50 - <70)
 Sangat kurang (Nilai <50)  Belum ada penilaian

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Pada Tahun 2025, UPT Stasiun PSDKP Tahuna telah melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi dan analisis pada setiap sasaran kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut :

SASARAN KEGIATAN 1 TERSELENGGARANYA INTELIJEN KELAUTAN DAN PERIKANAN SECARA EFEKTIF

Pencapaian Sasaran Kegiatan "Terselenggaranya Intelijen Kelautan dan Perikanan Secara Efektif" Tahun 2025 sebesar 100,00% berpredikat "Baik" dan diidentifikasi ke dalam 1 (satu) ISK, yaitu :



Nilai Kualitas Operasi Intelijen Kelautan

ISK. 1 “Nilai Kualitas Operasi Intelijen Kelautan” ditetapkan sebagai IKU dengan target nilai pada Tahun 2025 sebesar 100,00 Target Kinerja ISK.1 “Nilai Kualitas Operasi Intelijen Kela” berdasarkan Renstra dapat dilihat pada Tabel 4. berikut ini :

Tabel 4. “Nilai Kualitas Operasi Intelijen Kelautan”

Indikator Sasaran Kinerja	Target 2025 (Tahun Berjalan dan Awal Periode Renstra)	Target 2029
Nilai Kualitas Operasi Intelijen Kelautan	100,00 (Nilai)	100,00 (Nilai)

Berdasarkan informasi pada tabel diatas ditetapkan target pada tahun 2025 dan tahun 2029 sesuai dengan Renstra Ditjen PSDKP dengan target Nilai sebesar 100,00. pada tahun 2025 dilakukan pengukuran realisasi berdasarkan terget yang telah ditentukan. Adapun informasi dapat dilihat Tabel 5. Berikut ini.

Tabel 5. Hasil Capaian ISK.1 “Nilai Kualitas Operasi Intelijen Kelautan” Tahun 2025

Indikator Sasaran Kinerja	2025 (Nilai)		Persen	2026		Persen	2027		Persen	2028		Persen	2029		Persen
	T	C		T	C		T	C		T	C				
Nilai Kualitas Operasi Intelijen Kelautan	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00

Berdasarkan informasi dari tabel diatas, target yang ditentukan pada Tahun 2025 dengan Nilai 100,00 telah tercapai dengan Nilai 100,00 dan persentase pada aplikasi *Kinerjaku* sebesar 100,00% berpredikat “Baik”. Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya belum dapat dibandingkan dikarenakan tahun 2025 merupakan awal periode Renstra sehingga belum dapat dilakukan berbanding.

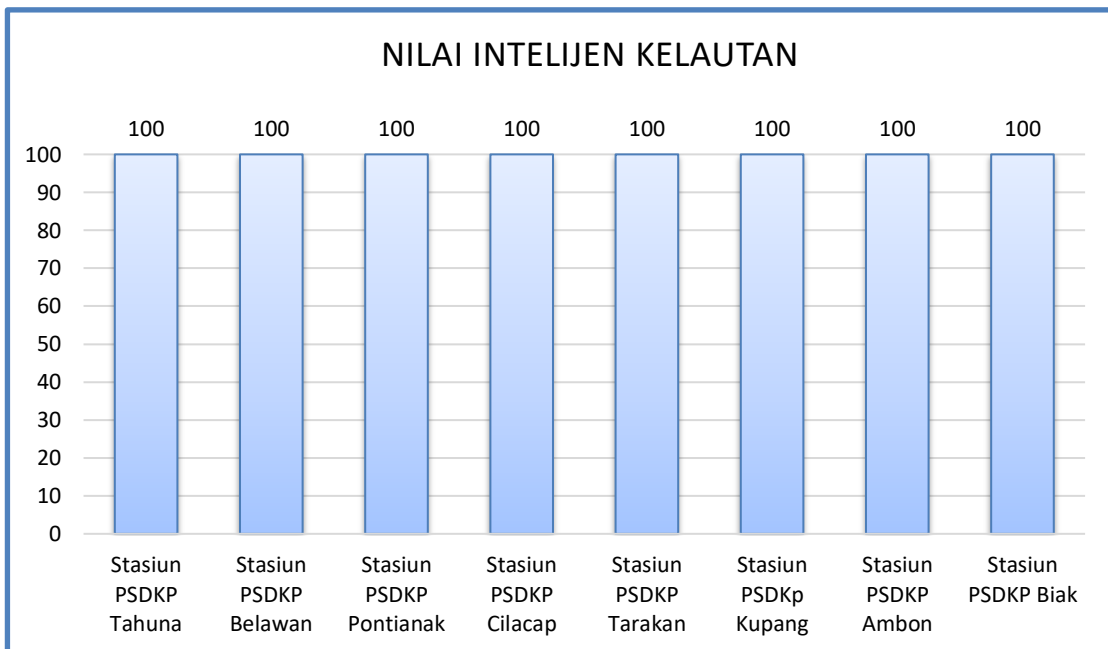
Tercapainya nilai ISK.1 "Nilai Kualitas Operasi Intelijen Kelautan" yaitu dengan terlaksananya operasi intelijen kelautan yang dilakukan oleh tim Pengawas Kelautan Stasiun PSDKP Tahuna pada tambang yang berada di Desa Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah dengan titik koordinat 3.4823567 N dan 125.653860 E. Adapun hasil dari kegiatan Intelijen Kelautan tersebut yaitu :

1. Penambang yang berasal dari Desa Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah terdiri dari 50 orang dan selebihnya berasal dari luar Desa Bowone;
2. Kegiatan pengolahan hasil penambangan menggunakan Sianida dan Karbon aktif yang didapatkan dari Manado (Toko Sumber Agung);
3. Tuan tanah atau pemilik tanah lahan pertambangan sudah bekerja sama dengan pemodal atau orang yang mendanai kegiatan tersebut;
4. Hasil wawancara dengan masyarakat dengan pertimbangan mendapatkan lapangan pekerjaan;
5. Sebagian besar pertambangan menggunakan alat berat berjenis Exavator dan Dinamit;
6. Kegiatan pertambangan dimulai sejak tahun 2018 setelah PT. Easy Asia melakukan survei kandungan emas;
7. Beberapa nama pemilik lahan yang dikelola a/n Frets Besinum, Udin (Nasarudin Menangkoda dan Yonatan Makatangin);
8. Dari hasil pengamatan dan wawancara dengan beberapa nelayan sekitar Desa Bowone yakni desa kulur yang sebagian nelayan dengan alat tangkap jaring insang (soma roa) bahwa mereka menolak kegiatan pertambangan karena dianggap mencemari perairan (warna air menjadi keruh) dan hal ini berdampak pada berkurangnya jumlah hasil tangkapan ikan.

Dari hasil kegiatan Operasi Intelijen Kelautan tersebut dapat disimpulkan bahwa informasi yang didapatkan oleh Tim Pengawas Kelautan dapat dikategorikan A1 "*Dapat dipercaya sepenuhnya dan dibenarkan oleh sumber lain*" dengan nilai 100,00 sesuai dengan kriteria nilai pada Manual Indikator Kinerja.

Indikator keberhasilan ISK.1 "Nilai Kualitas Operasi Intelijen Kelautan" yaitu dengan terlaksananya kegiatan Intelijen kelautan yang dilakukan oleh tim pengawas kelautan Stasiun PSDKP Tahuna di Desa Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah dengan aktivitas penambangan ilegal yang dilakukan oleh masyarakat sekitar dan mendapatkan informasi yang sesuai A1 "*Dapat dipercaya sepenuhnya dan dibenarkan oleh sumber lain*" dari hasil kegiatan Intelijen yang dilaksanakan oleh tim pengawas kelautan tersebut.

Adapun perbandingan capaian Kinerja "Nilai Kualitas Operasi Intelijen Kelautan" Tahun 2025 dengan UPT sejenis dapat dilihat pada gambar berikut :



Berdasarkan perbandingan pada gambar diatas, Stasiun PSDKP Tahuna mendapat nilai capaian yang sama dengan UPT sejenis lainnya. Diharapkan Stasiun PSDKP Tahuna dapat mempertahankan dan meningkatkan nilai capaian tersebut untuk periode yang akan datang.

**SASARAN
KEGIATAN 2**

**TERSELENGGARANYA PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN**

Pencapaian Sasaran Kegiatan "Terselenggaranya Pengawasan Sumber Daya Kelautan" pada Tahun 2025 sebesar 120,00% berpredikat "Istimewa" dan diidentifikasi ke dalam 1 (satu) ISK, yaitu :

ISK. 2

Nilai Kualitas Pengawasan Sumber Daya Kelautan (Nilai)

ISK.2 "Nilai Kualitas Pengawasan Sumber Daya Kelautan (Nilai)" ditetapkan sebagai IKU dengan target nilai pada Tahun 2025 sebesar 100,00%, dimana memiliki 3 (empat) komponen sebagai berikut:

- Nilai penyelesaian pengawasan OSS;
- Nilai penyelesaian pengawasan selain OSS;
- Nilai penyelesaian pengawasan insidental.

Persentase perhitungan nilai terdiri dari tiga tahapan kegiatan yang dipersyaratkan dari Manual IKU, yaitu: Tahapan persiapan (15%) yang dibuktikan dengan SPT, Surat pemberitahuan dan Daftar pertanyaan; Tahapan pemeriksaan kesesuaian kegiatan Usaha dengan peraturan perundang-undangan (65%) yang terdiri dari Berita acara pemeriksaan dan Formulir pemeriksaan SDK; serta Tahapan pelaporan (20%) yang terdiri dari Laporan Hasil Pemeriksaan. Apabila kegiatan pengawasan sumber daya kelautan telah memenuhi persyaratan tersebut maka capaiannya didapatkan sebesar 100%.

Target Kinerja ISK.2 "Nilai Kualitas Pengawasan Sumber Daya Kelautan (Nilai)" berdasarkan Renstra dapat dilihat pada Tabel 7. berikut ini.

Tabel 7 Target Kinerja Komponen ISK.2 "Indeks Pemeriksaan Pelaku Usaha Kelautan"

Komponen Indikator Sasaran Kinerja	Target 2025 (Tahun Berjalan dan Awal Periode Renstra)	Target 2029
Nilai Penyelesaian Pengawasan OSS	RKK 2 PU Ketaatan 100%	86,00 (Nilai)
Nilai Penyelesaian Pengawasan Selain OSS		
Nilai Penyelesaian Pengawasan Insidental		

Keterangan : RKK: Rencana Kerja Keuangan; ISK: Indikator Sasaran Kerja; T: Target; C: Capaian; PU: Pelaku Usaha

Pada tahun 2025, yang merupakan awal periode Renstra terdapat total target 5 pelaku usaha dengan tingkat ketaatan 100,00%. Adapun capaian kinerja Tahun 2025 pada ISK.2 dapat dilihat pada Tabel 8. sebagai berikut :

Tabel 8 Hasil Capaian Kinerja Komponen ISK.2 "Nilai Kualitas Pengawasan Sumber Daya Kelautan (Nilai)" Tahun 2025

Komponen Indikator Sasaran Kinerja	2025				2026				2027				2028				2029			
	RKK		ISK		RKK		ISK		RKK		ISK		RKK		ISK		RKK		ISK	
	T	C	T	C	T	C	T	C	T	C	T	C	T	C	T	C	T	C	T	C
Nilai Penyelesaian Pengawasan OSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nilai Penyelesaian Pengawasan Selain OSS	12 PU	12 PU	82, 00	120, 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nilai Penyelesaian Pengawasan Insidental	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Keterangan : RKK: Rencana Kerja Keuangan; ISK: Indikator Sasaran Kerja; T: Target; C: Capaian; PU: Pelaku Usaha

Berdasarkan informasi pada tabel diatas target yang ditetapkan pada tahun 2025 dengan nilai kualitas 82,00 telah tercapai dengan nilai kualitas 100,00 dan persentase pada aplikasi *Kinerjaku* sebesar 120,00% berpredikat "Istimewa". Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya indikator tersebut belum dapat dibandingkan, dikarenakan Tahun 2025 merupakan awal periode Renstra sehingga belum terdapat perbandingan nilai pada indikator tersebut. Dari segi jumlah pelaku usaha, sampai dengan akhir Tahun 2025 telah mencapai target jumlah pengawasan pelaku usaha kelautan yang ditentukan. Selain itu dari segi ketaatan, telah tercapai sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan.

Tercapainya target kinerja tersebut disebabkan beberapa kegiatan yang dilaksanakan di Tahun 2025, antara lain sebagai berikut:

- Tersedianya petunjuk teknis pengawasan kelautan terbaru, antara lain:
 - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan;
 - Peraturan Direktur Jenderal PSDKP Nomor 4/PER-DJPSDKP/2017 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di sekitarnya;
 - Peraturan Direktur Jenderal PSDKP Nomor 5/PER-DJPSDKP/2020 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Kegiatan Penangkapan Ikan yang Merusak;
- Kegiatan Supervisi pengawasan yang dilaksanakan sebagai upaya koordinasi antara Stasiun PSDKP Tahuna dan Satwas SDKP Talaud serta Wilker SDKP Salibabu serta dengan instansi terkait berjalan sangat baik;
- Sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang pengawasan sumber dayakelautan kepada stakeholder;

Secara rinci capaian kinerja dari ketiga komponen tersebut sebagai berikut:

1) Kepatuhan pelaku usaha perikanan dan non perikanan (selain OSS) dalam pengelolaan limbah

Pengawasan pencemaran perairan didasarkan kepada kepatuhan pelaku usaha perikanan dan non perikanan dalam pengelolaan limbah. Sampai dengan akhir Tahun 2025, terdapat target serta capaian pada komponen kepatuhan pelaku usaha perikanan dan non perikanan dalam pengelolaan limbah, rincian capaian dapat dilihat pada Tabel 9. sebagai berikut.

Tabel 9 Pelaku Usaha Perikanan dan Non Perikanan dalam Pengelolaan Limbah yang Diperiksa Kepatuhan nya Tahun 2025

NO	Pelaku Usaha	Lokasi	Jenis Pelaku Usaha	Hasil Pengawasan	Tindak Lanjut
1	KM. Madina Tahuna	Kelurahan Tidore, Kec. Tahuna Timur Kab. Kepl Sangihe	Penangkapan Ikan	1. Pada kapal perikanan telah disediakan wadah tempat pembuangan sampah organik maupun sampah plastik dan tempat pembuangan sisa pengisian minyak pelumas dan bahan lainnya 2. Selama triwulan I Tahun 2025 terindikasi PATUH dalam melaksanakan kegiatan penangkapan ikan	Kegiatan usaha dilanjutkan dengan tetap memperhatikan norma-norma yang berlaku pada perizinan berusaha dan memberikan sosialisasi kepada pelaku usaha mengenai pengelolaan limbah yang baik agar tidak terjadi pencemaran di laut yang disebabkan oleh kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan
2	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-

NO	Pelaku Usaha	Lokasi	Jenis Pelaku Usaha	Hasil Pengawasan	Tindak Lanjut
4	KM. Elfata	Kelurahan Tidore, Kec. Tahuna Timur Kab. Kepl Sangihe	Penangkapan Ikan	1. Pada kapal perikanan telah disediakan wadah tempat pembuangan sampah organik maupun sampah plastik dan tempat pembuangan sisa pengisian minyak pelumas dan bahan lainnya sepanjang Tahun 2025 terindikasi PATUH dalam melaksanakan kegiatan penangkapan ikan	Kegiatan usaha dilanjutkan dengan tetap memperhatikan norma-norma yang berlaku pada perizinan berusaha dan memberikan sosialisasi kepada pelaku usaha mengenai pengelolaan limbah yang baik agar tidak terjadi pencemaran di laut yang disebabkan oleh kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan

Penjelasan warna: ■ TW I Tahun 2025 ■ TW II Tahun 2025 ■ TW III Tahun 2025 ■ TW IV Tahun 2025

Sampai dengan akhir Tahun 2025, terdapat 2 (satu) pelaku usaha perikanan dan non perikanan dalam pengelolaan limbah yang diperiksa yakni KM. Madina Tahuna yang dilakukan pengawasan sebanyak 1 (satu) kali pada bulan Februari yaitu dengan jenis kegiatan Unit Kapal Perikanan. Hasil pengawasan diperoleh keterangan bahwa pada satu unit usaha kapal perikanan tersebut telah melaksanakan kegiatan operasional dengan patuh dan tidak terdapat pencemaran yang dihasilkan oleh kegiatan operasional tersebut. Pada bulan Oktober dilakukan pengawasan pencemaran perairan di kapal perikanan KM. Elfata sebanyak 1 (satu) kali. Hasil pengawasan diperoleh keterangan bahwa pada satu unit usaha kapal perikanan tersebut telah melaksanakan kegiatan operasional dengan patuh dan tidak terdapat pencemaran yang dihasilkan oleh kegiatan operasional tersebut. Target pada Tahun 2025 tercapai dengan terperiksanya 2 (dua) pelaku usaha pada bulan

Februari dan Oktober Tahun 2025 dan memenuhi target kelengkapan dokumen dengan nilai 100,00%.

Gambar 4
Pengawasan Usaha Perikanan dan Non Perikanan dalam
Pengelolaan Limbah (Selain OSS) Tahun 2025



Kepatuhan pelaku usaha pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi mencakup kegiatan pengawasan penangkapan/pengambilan, pengembangbiakan/budidaya, perdagangan, penelitian dan pengembangan (termasuk bioteknologi dan biofarmakologi), akuaria, dan pertukaran, serta pemeliharaan untuk kesenangan jenis ikan dilindungi dan/atau Appendiks CITES sesuai ketentuan perlindungannya pada *taksa pisces, crustacea, mollusca, coelenterata, echinodermata, amphibia, reptilia, algae* dan biota perairan lainnya yang hidup di laut, air tawar dan air payau untuk kegiatan penelitian dan pengembangan, pengembangbiakan, perdagangan/peredaran, aquaria, pertukaran dan pemeliharaan untuk kesenangan. Pada Tahun 2025, terdapat capaian pada komponen kepatuhan pelaku usaha pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi, dengan rincian capaian dapat dilihat pada Tabel 10. sebagai berikut.

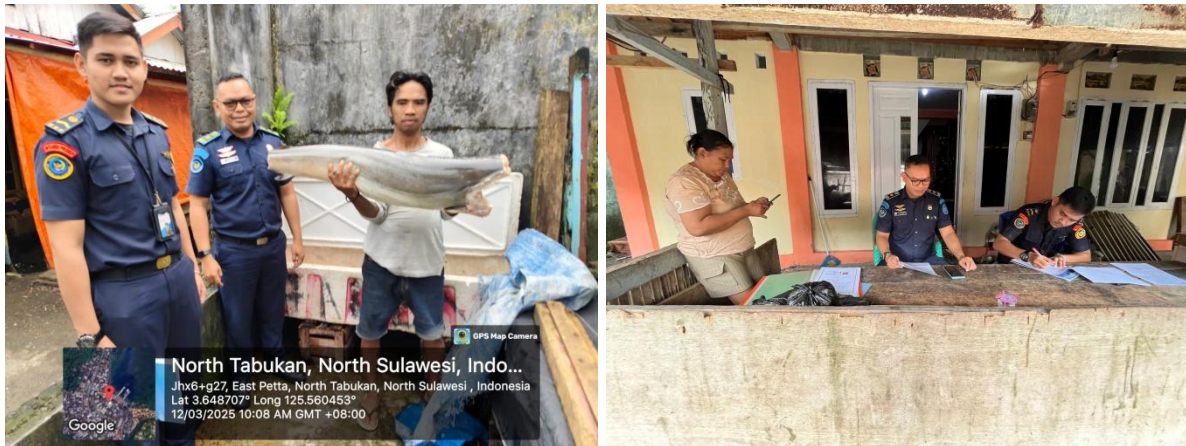
Tabel 10 Pelaku Usaha Pemanfaat Jenis Ikan yang Dilindungi yang Diperiksa Kepatuhan nya Tahun 2025

No	Pelaku Usaha	Lokasi	Jenis Pelaku Usaha	Hasil Pengawasan	Tindak Lanjut
1	Widiawati Lawendatu	Kampung Petta, Kec. Tabukan Utara, Kab. Kepl Sangihe	Penangkapan/ Pengambilan Ikan Bersirip (<i>Pisces</i>) yang Dilindungi dan/atau Termasuk Dalam <i>Appendiks</i> CITES (03151)	1) Pelaku Usaha telah memiliki dokumen perizinan berusaha; 2) Pelaku Usaha telah memiliki SIPJI Perdagangan Dalam Negeri.	Kegiatan usaha dapat dilanjutkan dengan tetap memperhatikan hak dan kewajiban sebagaimana tertuang dalam dokumen perizinan
2	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-

Penjelasan warna: TW I Tahun 2025 TW II Tahun 2025 TW III Tahun 2025 TW IV Tahun 2025

Pada tabel diatas realisasi pelaku usaha pemanfaatan ikan yang dilindungi, hingga akhir Tahun 2025 terdapat 1 (satu) Pelaku Usaha atas nama Widiawati Lawendatu yang melakukan kegiatan pemanfaatan ikan yang dilindungi dengan kelompok jenis ikan Hiu dan Pari dimana dari kedua jenis ikan tersebut, terdapat beberapa spesies yang dilindungi. Hasil pengawasan diperoleh keterangan bahwa pelaku usaha telah memiliki dokumen perizinan berusaha serta dokumen Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) Dalam Negeri. Target pada Tahun 2025 telah tercapai dengan terperiksanya 1 (satu) pelaku usaha pada bulan Maret dan telah memenuhi target kelengkapan dokumen dengan nilai 100,00%.

Gambar 5
Pengawasan Jenis Ikan yang Dilindungi Tahun 2025



3) Kepatuhan pelaku usaha pemanfaat pesisir, pulau-pulau kecil dan ruang laut (selain OSS)

Pengawasan pemanfaatan wilayah pulau-pulau kecil difokuskan pada kegiatan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya dengan status Penanaman Modal Asing (PMA) dan/atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Pada komponen kepatuhan pemanfaatan pesisir, pulau-pulau kecil dan ruang laut belum terdapat target dan capaian pada Tahun 2025. detail capaian dapat dilihat pada Tabel 11. sebagai berikut :

Tabel 11 Pelaku Usaha Pemanfaat Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Ruang Laut yang Diperiksa Kepatuhan Tahun 2025

No	Pelaku Usaha	Lokasi	Jenis Pelaku Usaha	Hasil Pengawasan	Tindak Lanjut
1	-	-	-	-	-
2	CV. Hayana Group	Kel. Santiago, Kec. Tahuna, Kab. Kepl Sangihe	Penyedia Akomodasi Jangka Pendek	Sosialisasi Tentang PERMEN KP. No. 10 Tahun 2024	Diberikan Rekomendasi Untuk Melakukan Pengurusan Dokumen Surat Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau kecil

No	Pelaku Usaha	Lokasi	Jenis Pelaku Usaha	Hasil Pengawasan	Tindak Lanjut
	Sangihe Mansion	Kel. Soataloara, Kec. Tahuna, Kab. Kepl Sangihe	Penyedia Akomodasi Jangka Pendek	Sosialisasi Tentang PERMEN KP. No. 10 Tahun 2024	Diberikan Rekomendasi Untuk Melakukan Pengurusan Dokumen Surat Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau kecil
	Tahuna Beach Hotel	Kab. Kepl Sangihe	Pariwisata	Sosialisasi Tentang PERMEN KP. No. 10 Tahun 2024	Diberikan Rekomendasi Untuk Melakukan Pengurusan Dokumen Surat Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau kecil
	Hotel Nasional	Kab. Kepl Sangihe	Penyedia Akomodasi Jangka Pendek	Sosialisasi Tentang PERMEN KP. No. 10 Tahun 2024	Diberikan Rekomendasi Untuk Melakukan Pengurusan Dokumen Surat Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau kecil
	Penginapan Remaja	Kec. Melonguane, Kab. Kepl Talaud	Penyedia Akomodasi Jangka Pendek	Sosialisasi Tentang PERMEN KP. No. 10 Tahun 2024	Diberikan Rekomendasi Untuk Melakukan Pengurusan Dokumen Surat Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau kecil
	Meli Sawulu	Kec. Melonguane, Kab. Kepl Talaud	Penyedia Akomodasi Jangka Pendek	Sosialisasi Tentang PERMEN KP. No. 10 Tahun 2024	Diberikan Rekomendasi Untuk Melakukan Pengurusan

No	Pelaku Usaha	Lokasi	Jenis Pelaku Usaha	Hasil Pengawasan	Tindak Lanjut
					Dokumen Surat Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau kecil
	Junaedi Bokang	Kec. Melonguane, Kab. Kepl Talaud	Penginapan	Sosialisasi Tentang PERMEN KP. No. 10 Tahun 2024	Diberikan Rekomendasi Untuk Melakukan Pengurusan Dokumen Surat Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau kecil
	Silipana Tamodia	Kec. Melonguane, Kab. Kepl Talaud	Penyedia Akomodasi Jangka Pendek	Sosialisasi Tentang PERMEN KP. No. 10 Tahun 2024	Diberikan Rekomendasi Untuk Melakukan Pengurusan Dokumen Surat Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau kecil
	Eddy Wijaya	Kec. Melonguane, Kab. Kepl Talaud	Penyedia Akomodasi Jangka Pendek	Sosialisasi Tentang PERMEN KP. No. 10 Tahun 2024	Diberikan Rekomendasi Untuk Melakukan Pengurusan Dokumen Surat Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau kecil
	Irene B. Riung	Kec. Melonguane, Kab. Kepl Talaud	Hotel Melati	Sosialisasi Tentang PERMEN KP. No. 10 Tahun 2024	Diberikan Rekomendasi Untuk Melakukan Pengurusan Dokumen Surat Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau kecil

No	Pelaku Usaha	Lokasi	Jenis Pelaku Usaha	Hasil Pengawasan	Tindak Lanjut
3	Hattarua	Kpg. Lenganeng Kec. Tabukan Utara, Kab. Kepl Sangihe	Penyedia Akomodasi Jangka Pendek (55199)	Sosialisasi Tentang PERMEN KP. No. 10 Tahun 2024	Diberikan Rekomendasi Untuk Melakukan Pengurusan Dokumen Surat Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau kecil
	Wisma Assalam	Kpg/Kelurahan Tidore, Kec. Tahuna Timur, kab. Kepl Sangihe	Penyedia Akomodasi Lainnya (55900)	Sosialisasi Tentang PERMEN KP. No. 10 Tahun 2024	Diberikan Rekomendasi Untuk Melakukan Pengurusan Dokumen Surat Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau kecil
	Penginapan Setia	Kpg Sawang Bendar Kec. Tahuna, Kab. Kepl Sangihe	Penyedia Akomodasi Lainnya (55900)	Sosialisasi Tentang PERMEN KP. No. 10 Tahun 2024	Diberikan Rekomendasi Untuk Melakukan Pengurusan Dokumen Surat Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau kecil
	Hotel Bintang Utara	Kpg/ Kelurahan Tona II, Kec. Tahuna Timur, Kab. Kepl Sangihe	Penyedia Akomodasi Lainnya (55900)	Sosialisasi Tentang PERMEN KP. No. 10 Tahun 2024	Diberikan Rekomendasi Untuk Melakukan Pengurusan Dokumen Surat Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau kecil
	Madina Tahuna	Kelurahan Tidore, Kec. Tahuna Timur, Kab. Kepl Sangihe	Penginapan	Sosialisasi Tentang PERMEN KP. No. 10 Tahun 2024	Diberikan Rekomendasi Untuk Melakukan Pengurusan

No	Pelaku Usaha	Lokasi	Jenis Pelaku Usaha	Hasil Pengawasan	Tindak Lanjut
					Dokumen Surat Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau kecil
	Penginapan Anggrek	Kelurahan Tona II, Kec. Tahuna, Kab. Kepl Sangihe	Penyedia Akomodasi Jangka Pendek (55199)	Sosialisasi Tentang PERMEN KP. No. 10 Tahun 2024	Diberikan Rekomendasi Untuk Melakukan Pengurusan Dokumen Surat Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau kecil
4					

Penjelasan warna: TW I Tahun 2025 TW II Tahun 2025 TW III Tahun 2025 TW IV Tahun 2025

Berdasarkan informasi pada tabel diatas, hingga akhir Tahun 2025 telah terdapat 16 objek pelaku Usaha Pemanfaat Pulau-Pulau Kecil yang dilakukan sosialisasi terkait dengan Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2024. Pemberian sosialisasi dilakukan pada pelaku usaha yang memiliki kegiatan berusaha baik itu perhotelan, pariwisata, penginapan, dan penyedia akomodasi jangka pendek lainnya.

4) Kepatuhan pelaku usaha perikanan terhadap ketentuan pelarangan *destructive fishing (selain OSS)*

Kepatuhan pelaku usaha perikanan terhadap ketentuan pelarangan *destructive fishing* didasarkan pada kapal perikanan dibawah 10 GT yang diperiksa dan tidak membawa alat/bahan dan/atau hasil tangkapan yang berasosiasi dengan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat/bahan yang merusak (bom ikan/racun ikan/setrum ikan). Pada komponen kepatuhan pelaku usaha perikanan terhadap ketentuan pelarangan *destructive fishing*, terdapat capaian dengan detail capaian dapat dilihat pada Tabel 12. sebagai berikut :

Tabel 12 Pelaku Usaha Perikanan Terhadap Ketentuan Pelanggaran Destructive Fishing yang Diperiksa Kepatuhannya Tahun 2025

No	Pelaku Usaha	Lokasi	Hasil Pengawasan	Tindak Lanjut
1	Risto Mangadil	Kelurahan Iesa, Kec. Tahuna Timur. Kab. Kepl Sangihe	Tidak ditemukan indikasi kegiatan <i>destructive fishing</i> . Alat tangkap yang digunakan hand line. Hasil tangkapan ikan pelagis	Pelaku usaha melanjutkan kegiatan perikanan
	Jenerya Mamagi	Desa Sawang, Kec. Melongwane Barat, Kab. Kepl Talaud	Tidak ditemukan indikasi kegiatan <i>destructive fishing</i> . Alat tangkap yang digunakan hand Line. Hasil tangkapan ikan pelagis	Pelaku usaha melanjutkan kegiatan perikanan
2	-	-	-	-
3	-	-	-	-
4	-	-	-	-

Penjelasan warna: TW I Tahun 2025 TW II Tahun 2025 TW III Tahun 2025 TW IV Tahun 2025

Berdasarkan informasi pada tabel diatas, realisasi pengawasan pelaku usaha perikanan terhadap ketentuan pelarangan *destructive fishing* hingga akhir Tahun 2025 berjumlah 2 (dua) pelaku usaha atas nama Risto Mangadil, dan Jenerya Mamagi. Dari 2 (dua) pelaku usaha tersebut, penggunaan alat tangkap Hand Line dengan hasil tangkapan antara lain ikan demersal dan ikan pelagis. Hasil pengawasan tidak ditemukan dugaan pelanggaran dengan indikasi melakukan kegiatan penangkapan ikan yang merusak.

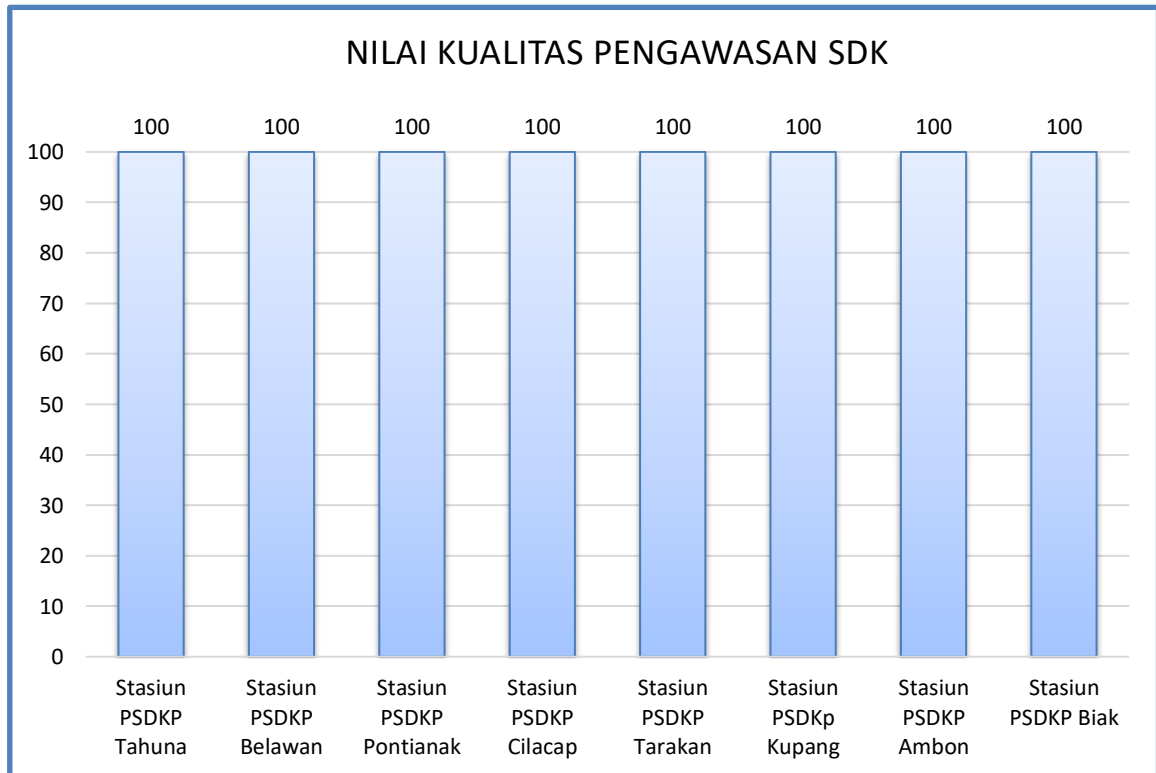
Target hingga akhir Tahun 2025 sebesar 2 (dua) pelaku usaha dengan capaian realisasi telah diperiksa sebesar 2 (dua) pelaku usaha pada Triwulan I Tahun 2025 dan memenuhi target kelengkapan dokumen dengan nilai 100,00%.

Gambar 6
 Pengawasan Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan Terhadap
 Ketentuan Pelarangan *Destructive Fishing* (Selain OSS) Tahun 2025



Adapun perbandingan capaian kinerja “Nilai Kualitas Pengawasan Sumber Daya Kelautan” tahun 2025 dengan UPT sejenis dapat dilihat pada gambar sebagai berikut.

Gambar 12
 Perbandingan Capaian “Kualitas Pengawasan Sumber Daya Kelautan”
 Tahun 2025 dengan UPT Sejenis



Berdasarkan perbandingan pada gambar diatas, Stasiun PSDKP Tahuna mendapat capaian yang sama dengan seluruh UPT sejenis dan mencapai target yang ditentukan. Diharapkan Stasiun PSDKP Tahuna dapat mempertahankan dan meningkatkan nilai capaian “Nilai Kualitas Pengawasan Sumber Daya Kelautan” pada periode yang akan datang.

**SASARAN
KEGIATAN 3**

TERSELENGGARANYA PENGAWASAN SUMBER DAYA
PERIKANAN

Pencapaian Sasaran Kegiatan “Terselenggaranya Pengawasan Sumber Daya Perikanan” pada Tahun 2025 sebesar 120,00% berpredikat “Istimewa” dengan diidentifikasi ke dalam 1 (satu) ISK, yaitu:

ISK. 3

Nilai Kualitas Pengawasan Sumber Daya Perikanan (Nilai)

ISK.3 “Nilai Kualitas Pengawasan Sumber Daya Perikanan” (Nilai) ditetapkan sebagai IKU dengan target Nilai Tahun 2025 sebesar 100,00 terdiri dari 6 (enam) detail sebagai berikut:

- Pengawasan kapal perikanan;
- Pengawasan rutin berbasis OSS (*One Single System*);
- Pengawasan importasi hasil perikanan;
- Pengawasan kegiatan destructive fishing;
- Pengawasan pemanfaat sumber daya perikanan;
- Pengawasan insidental/atensi pimpinan.

Target Kinerja ISK.3 “Nilai Kualitas Pengawasan Sumber Daya Perikanan (Nilai)” berdasarkan Renstra dapat dilihat pada Tabel 14. berikut ini.

Tabel 14 Target Kinerja Komponen ISK.3 “Nilai Kualitas Pengawasan Sumber Daya Perikanan (Nilai)”

Komponen Indikator Sasaran Kinerja	Target 2025 (Tahun Berjalan dan Awal Periode Renstra)	Target 2029
Pengawasan Kapal Perikanan	-	86,00 (Nilai)
Pengawasan Rutin Berbasis OSS	RKK 2 PU Ketaatan 100%	
Pengawasan Importasi Hasil Perikanan	-	
Pengawasan kegiatan destructive fishing	-	
Pengawasan pemanfaat sumber daya perikanan	RKK 1 PU Ketaatan 100%	
Pengawasan insidental/atensi pimpinan	RKK 2 PU Ketaatan 100%	

Keterangan : RKK: Rencana Kerja Keuangan; ISK: Indikator Sasaran Kerja; T: Target; C: Capaian; PU: Pelaku Usaha

Pada tahun 2025, yang merupakan awal periode Renstra terdapat total target 5 pelaku usaha dengan target nilai capaian 82,00 dengan nilai realisasi capaian sebesar 100,00. Adapun capaian kinerja ISK.3 pada Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 15. sebagai berikut:

Tabel 15 Hasil Capaian Kinerja Komponen ISK.3 “Nilai Kualitas Pengawasan Sumber Daya Perikanan (Nilai)” Tahun 2025

Komponen Indikator Sasaran Kinerja	2025		2026		2027		2028		2029		Persen											
	RKK		ISK		RKK		ISK		RKK			ISK										
	T	C	T	C	T	C	T	C	T	C		T	C									
Pengawasan Kapal Perikanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pengawasan Rutin Berbasis OSS	2	2	82,	100,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120,00%

Komponen Indikator Sasaran Kinerja	2025				2026				2027				2028				2029				Persen
	RKK		ISK		RKK		ISK		RKK		ISK		RKK		ISK		RKK		ISK		
	T	C	T	C	T	C	T	C	T	C	T	C	T	C	T	C	T	C	T	C	
Pengawasan Importasi Hasil Perikanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengawasan kegiatan destructive fishing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengawasan pemanfaat sumber daya perikanan	1 PU	1 PU	82,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120,00%
Pengawasan insidental/ate nsi pimpinan	2 PU	2 PU	82,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120,00%

Keterangan : RKK: Rencana Kerja Keuangan; ISK: Indikator Sasaran Kerja; T: Target; C: Capaian; PU: Pelaku Usaha

Dari segi RKK, target jumlah pelaku usaha perikanan yang diperiksa sampai dengan Tahun 2025 sebesar 5 (lima) pelaku usaha dan tingkat ketaatan 100,00%. Realisasi sampai dengan akhir Tahun 2025 sebanyak 5 (lima) pelaku usaha, yang terdiri dari pengawasan berbasis OSS pada Triwulan II sebanyak 2 Pelaku Usaha, 2 (dua) pengawasan Insidental pada Triwulan I dan Triwulan III serta 1 (satu) pengawasan berdasarkan pemanfaat SDP pada Triwulan IV Tahun 2025 dengan tingkat ketaatan 100,00% dan persentase pada aplikasi *Kinerjaku* sebesar 120,00% berpredikat "Istimewa".

Apabila dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya, ISK tersebut tidak dapat dibandingkan, dikarenakan Tahun 2025 merupakan awal periode Renstra, sehingga belum terdapat target maupun capaian yang dapat dibandingkan. Dari segi jumlah pelaku usaha, Tahun 2025 telah mencapai target jumlah pelaku usaha perikanan yang diperiksa. Dari segi ketaatan, telah tercapai sesuai dengan target yang ditentukan.

Tercapainya target kinerja tersebut disebabkan beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2025, antara lain sebagai berikut:

- Tersedianya petunjuk teknis pengawasan perikanan terbaru, antara lain:
 - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan;
 - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Standar Laik Operasi dan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan;
 - Peraturan Direktur Jenderal PSDKP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bidang Perikanan.
- Penerapan Perjanjian Kerja Sama Pengawasan antara Dinas Perikanan Daerah Kepl. Sangihe dengan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- Kegiatan Supervisi pengawasan yang dilaksanakan sebagai upaya koordinasi antara Stasiun PSDKP Tahuna dan Satwas SDKP Talaud serta Wilker SDKP Salibabu serta dengan instansi terkait berjalan sangat baik;
- Sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang pengawasan sumber dayaperikanan kepada stakeholder;

Secara rinci capaian kinerja ISK.3 "Indeks Pemeriksaan Pelaku Usaha Perikanan (Indeks)" Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Pengawasan Rutin Berbasis OSS

Komponen "Pengawasan Rutin Berbasis OSS" merupakan pemeriksaan Unit Pengolahan hasil perikanan pengawasan dilakukan melalui pengawasan rutin perizinan berusaha berbasis risiko, serta kesesuaian terhadap kegiatan operasional perikanan yang dilaksanakan. Pada Tahun 2025 telah tercapai sebesar 100,00% dari target 100,00%. Persentase ini didapatkan karena telah melengkapi tahapan yang telah dipersyaratkan dari Manual Indikator Kinerja

(IKU), yaitu : 1). Tahapan Persiapan (10%) yang terdiri dari Surat Tugas, Surat Pemberitahuan Kepada Pelaku Usaha dan Daftar Pertanyaan. 2). Tahapan Pemeriksaan (70%) yang terdiri dari Hasil Pengawasan dan Data Dukung. 3). Tahapan Pelaporan (20%) yang terdiri dari Laporan dan data dukung hasil pemeriksaan yang telah disampaikan sesuai dengan format Direktorat PPSPD. Apabila setiap pemeriksaan Unit Pengolahan Ikan telah memenuhi persyaratan tersebut maka capaiannya didapatkan sebesar 100%. Sementara itu, Unit Pengolahan Hasil Perikanan yang telah dilakukan pemeriksaan dapat dilihat pada Tabel 16. berikut ini.

Tabel 16 Pemeriksaan Kepatuhan Subsektor Pengolahan Ikan Lingkup Stasiun PSDKP Tahuna Tahun 2025

NO	NAMA PERUSAHAAN PERORANGAN	KODE KBLI	SUBSEKTOR	HASIL PEMERIKSAAN	KEPATUHAN PELAKU USAHA
1.	PT. Jassendo Sentosa Mandiri	10213	Pengolahan Hasil Perikanan	Dokumen SKP telah berakhir masa berlaku pada tanggal 20 Januari 2025, sehingga diberikan Sanksi Administrasi berupa Teguran I dan himbauan kepada penanggungjawab kegiatan untuk dapat segera melengkapi dokumen tersebut	Tidak taat dan diberikan sanksi administrasi berupa surat teguran I
	Marcelino Hontong	03111	Penangkapan Ikan di Laut	Dokumen perizinan sudah terpenuhi dan kelengkapan teknis sudah terpenuhi	Melanjutkan kegiatan usaha penangkapan ikan dengan tetap menaati

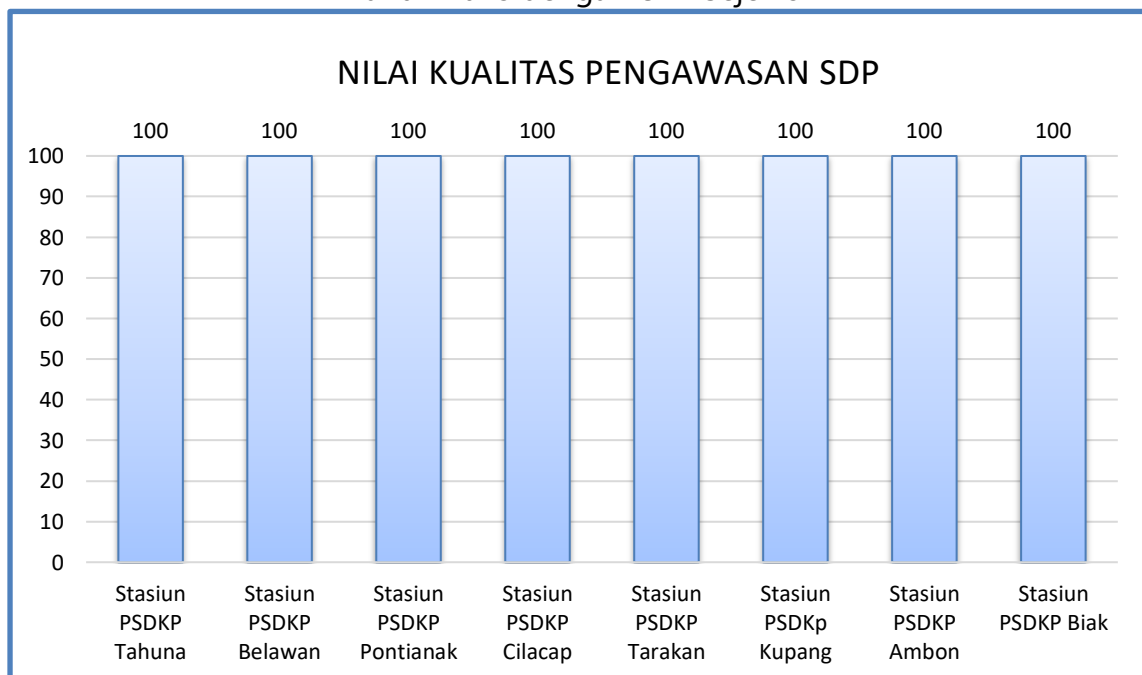
					undang-undang yang berlaku
2.	-	-	-	-	-
3.	-	-	-	-	-

Penjelasan warna: ■ TW I Tahun 2025 ■ TW II Tahun 2025 ■ TW III Tahun 2025 ■ TW IV Tahun 2025

Stasiun PSDKP Tahuna mendapatkan nilai 100,00% dan persentase pada aplikasi *Kinerjaku* sebesar 120,00% untuk capaian kinerja pada Sasaran Kegiatan 3 Tahun 2025. Berdasarkan analisis terhadap pencapaian kinerja pada SK. 3 dan ISK.3 serta analisis terhadap realisasi anggaran sudah tercapai dengan baik sesuai dengan yang telah direncanakan.

Adapun perbandingan capaian kinerja “Nilai Kualitas Pengawasan Sumber Daya Kelautan” tahun 2025 dengan UPT sejenis dapat dilihat pada gambar sebagai berikut.

Gambar 12
Perbandingan Capaian “Kualitas Pengawasan Sumber Daya Kelautan”
Tahun 2025 dengan UPT Sejenis



Berdasarkan perbandingan pada gambar diatas, Stasiun PSDKP Tahuna mendapat capaian yang sama dengan seluruh UPT sejenis dan mencapai target yang ditentukan. Diharapkan Stasiun PSDKP Tahuna dapat mempertahankan dan meningkatkan nilai capaian “Nilai Kualitas Pengawasan Sumber Daya Perikanan” pada periode yang akan datang.

**SASARAN
KEGIATAN 4**

TERSELENGGARANYA OPERASI ARMADA PENGAWASAN
SDKP SECARA EFEKTIF



Pencapaian Sasaran Kegiatan “Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif” pada Tahun 2025 sebesar 103,20% berpredikat “Baik” dan diidentifikasi ke dalam 3 (tiga) ISK, yaitu :

ISK. 4

Indeks Operasi Kapal Pengawas (Indeks)

ISK. 4 “Indeks operasi kapal pengawas” ditetapkan sebagai IKU dengan target indeks pada Tahun 2025 sebesar 92,00. Target Kinerja ISK.4 “Indeks operasi kapal pengawas” berdasarkan Renstra dapat dilihat pada Tabel 18. berikut ini :

Tabel 18
Target Kinerja Komponen ISK.4 "Indeks Operasi Kapal Pengawas"

Indikator Sasaran Kinerja	Target 2025 (Tahun Berjalan dan Awal Periode Renstra)	Target 2029
Indeks Operasi Kapal Pengawas	92,00 (Indeks)	-

Berdasarkan informasi pada tabel diatas, ISK.4 "Indeks Operasi Kapal Pengawas" pada Tahun 2025 yang merupakan tahun berjalan dan awal periode Renstra terdapat target Indeks yang ditetapkan sebesar 92,00. Hingga akhir Tahun 2025, dilakukan pengukuran realisasi berdasarkan target yang telah ditentukan. Adapun informasi dapat dilihat pada Tabel 19. berikut ini.

Tabel 19 Hasil Capaian ISK.4 "Indeks Operasi Kapal Pengawas"
Tahun 2025

Indikator Sasaran Kinerja	2024		Persen	2025		Persen
	T	C		T	C	
Indeks Operasi Kapal Pengawas	91,00	98,44	108,18	92,00	96,80	105,22

Berdasarkan Informasi pada tabel diatas, target yang ditetapkan pada Tahun 2025 dengan nilai indeks 92,00 telah tercapai dengan nilai indeks 96,80 dan persentase pada aplikasi *Kinerjaku* sebesar 105,22 berpredikat "Baik". Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2024 nilai ISK pada tahun 2025 lebih rendah akan tetapi capaian ISK tersebut tetap melebihi nilai target yang telah ditentukan. Adapun nilai pada tahun 2025 didapatkan dari perhitungan pada Tabel 20. di bawah ini.

Tabel 20 Perhitungan Capaian ISK.4 "Indeks Operasi Kapal Pengawas"
Tahun 2025

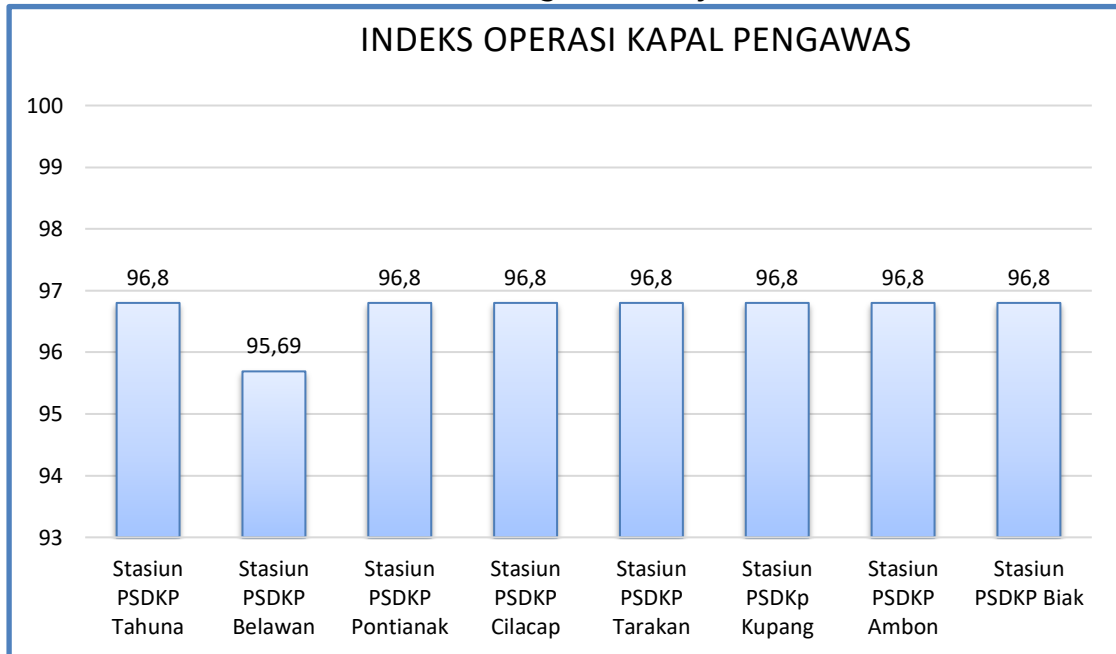
Kapal Pengawas	Variabel Pembentuk	Indikator	Target/ Realisasi	Nilai Target/ Realisasi	Nilai Indikator	Nilai Variabel Pembentuk	Nilai Indeks Kinerja per Unit
KP. Hiu 15	Jumlah Pemeriksaan Kelautan dan Perikanan (40%)	Pemeriksaan Kapal Perikanan (70%)	Target	207	72,37	50,00	96,80
			Realisasi	214			
		Pemeriksaan Kelautan (30%)	Target	10	39,00		
			Realisasi	13			
	Persentase Cakupan Wilayah Pengawasan (40%)	-	Target	0,96	45,00	45,00	
			Realisasi	1,04			
	Tindak Lanjut Target Operasi (15%)	Intercept Indikasi Pelanggaran (60%)	Target	8	60,00	1,80	
			Realisasi	8			
		Dukungan Kegiatan SAR (40%)	Target	0	0		
			Realisasi	0			
	Dukungan Operasi Lainnya (5%)	Penyitaan Alat Tangkap Terlarang (30%)	Target	0	0	0	
			Realisasi	0			
		Pemutusan Rumpon Ilegal (30%)	Target	0	0		
			Realisasi	0			
Dukungan Operasi Bersama (40%)		Target	0	0			
		Realisasi	0				

Berdasarkan tabel diatas, nilai "Indeks kinerja operasi kapal pengawas" Tahun 2025 didapat dari Kapal Pengawas Hiu 15 sebesar 96,80. Nilai tersebut diperoleh dari 4 (empat) variabel pembentuk antara lain :

1. Jumlah pemeriksaan kelautan dan perikanan (40%) dengan nilai 50,00 terdiri dari:
 - a. Pemeriksaan kapal perikanan (70%) dari target 207 kapal diperiksa dan realisasi 214 kapal diperiksa dengan nilai 72,37;
 - b. Pemeriksaan kelautan (30%) dari target 10 objek pengawasan kelautan dan realisasi 13 objek pengawasan kelautan dengan nilai 39,00.
2. Persentase cakupan wilayah pengawasan (40%) dari target 0,96 dan realiasi 1,04 dengan nilai 45,00;
3. Tindak lanjut target operasi (15%) dengan nilai 15, terdiri dari:
 - a. Intercept indikasi pelanggaran (60%) belum terdapat target 8 dan realisasi 8 dengan nilai 60;
 - b. Dukungan kegiatan SAR (40%) belum terdapat target dan realisasi dengan nilai 0.
4. Dukungan operasi lainnya (5%) dengan nilai 5, terdiri dari:
 - a. Penyitaan alat tangkap terlarang (30%) belum terdapat target dan realisasi dengan nilai 0;
 - b. Pemutusan rumpon ilegal (30%) dari target 0 dan realisasi 0 dengan nilai 0;
 - c. Dukungan operasi bersama (40%) belum terdapat target dan realisasi dengan nilai 0.

Adapun perbandingan capaian Kinerja "Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas" tahun 2025 dengan UPT sejenis dapat dilihat pada gambar sebagai berikut.

Gambar 4
Perbandingan Capaian “Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas” Tahun 2025 dengan UPT Sejenis



Berdasarkan perbandingan pada gambar diatas, Stasiun PSDKP Tahuna mendapatkan nilai capaian yang hampir sama dengan seluruh UPT sejenis, hanya 1 UPT yang mendapatkan nilai capaian yang lebih rendah yaitu Stasiun PSDKP Belawan. Diharapkan Stasiun PSDKP Tahuna dapat mempertahankan dan meningkatkan nilai capaian “Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas” dengan tercapainya/terpenuhinya seluruh aspek perhitungan yang telah ditetapkan untuk periode yang akan datang.

Gambar 5
Kegiatan Operasi Kapal Pengawas Tahun 2025





ISK. 5

Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas (Indeks)

ISK.5 “Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas” ditetapkan sebagai IKU dengan target indeks pada Tahun 2025 sebesar 92,00. Target Kinerja ISK.5 “Indeks kinerja operasi speedboat pengawas” berdasarkan Renstra dapat dilihat pada Tabel 21. berikut ini.

Tabel 21 Target ISK.5 “Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas”

Indikator Sasaran Kinerja	Target 2025 (Tahun Berjalan dan Awal Periode Renstra)	Target 2029
Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas	Nilai Indeks 92,00	-

Berdasarkan informasi pada tabel diatas, ISK.5 “Indeks Operasi Speedboat Pengawas” pada Tahun 2025 yang merupakan tahun berjalan dan awal periode Renstra terdapat target Indeks yang ditetapkan sebesar 92,00. Hingga akhir Tahun 2025, dilakukan pengukuran realisasi berdasarkan target yang telah ditentukan. Adapun informasi dapat dilihat pada **Tabel 19**. berikut ini.

Tabel 19 Hasil Capaian ISK.5 "Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas" Tahun 2025

Indikator Sasaran Kinerja	2024		Persen	2025		Persen
	T	C		T	C	
Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas	91,00	100,00	109,89	92,00	97,50	105,98

Berdasarkan Informasi pada tabel diatas, target yang ditentukan pada Tahun 2025 dengan nilai Indeks 92,00 telah tercapai dengan nilai Indeks 97,50 dan persentase pada aplikasi Kinerja sebesar 105,98% dengan predikat "Baik". Apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2024 nilai ISK tersebut lebih rendah pada tahun sebelumnya. Meskipun demikian capaian ISK tersebut pada tahun 2025 masih melebihi nilai target yang telah ditetapkan. Adapun nilai Tahun 2025 didapat dari perhitungan pada Tabel 20. di bawah ini.

Tabel 20. Perhitungan "Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas" Tahun 2025

Speedboat Pengawas	Variabel Pembentuk	Indikator	Target/ Realisasi	Nilai Target/ Realisasi	Nilai Indikator	Nilai Variabel Pembentuk	Nilai Indeks Kinerja per Unit
SP. Napoleon 017	Jumlah Pemeriksaan Kelautan dan Perikanan (40%)	Pemeriksaan Kapal Perikanan (50%)	Target	15	53,30	50,00	100,00
			Realisasi	16			
		Pemeriksaan Kelautan (50%)	Target	2	75,00		
			Realisasi	3			
	Persentase Cakupan Wilayah Pengawasan (45%)	Target	0,00010	45,00	45,00		
		Realisasi	0,00014				
	Tindak Lanjut Target Operasi (5%)	Target	1	5,00	5,00		
		Realisasi	1				
SP. Napoleon	Jumlah Pemeriksaan	Pemeriksaan Kapal	Target	12	50,00	50,00	95,00

Speedboat Pengawas	Variabel Pembentuk	Indikator	Target/ Realisasi	Nilai Target/ Realisasi	Nilai Indikator	Nilai Variabel Pembentuk	Nilai Indeks Kinerja per Unit
039	Kelautan dan Perikanan (40%)	Perikanan (50%)	Realisasi	12			
		Pemeriksaan Kelautan (50%)	Target	2	75,00		
			Realisasi	3			
	Persentase Cakupan Wilayah Pengawasan (45%)	Target	0,00008	45,00	45,00		
		Realisasi	0,00013				
	Tindak Lanjut Target Operasi (5%)	Target	0	0	0		
		Realisasi	0				
	Total Nilai						

Berdasarkan tabel di atas, nilai "Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas" Tahun 2025 didapat dari Speedboat Pengawas Napoleon 017 dan Napoleon 039 sebesar 100,00. Nilai tersebut diperoleh dari 3 (tiga) variabel pembentuk antara lain :

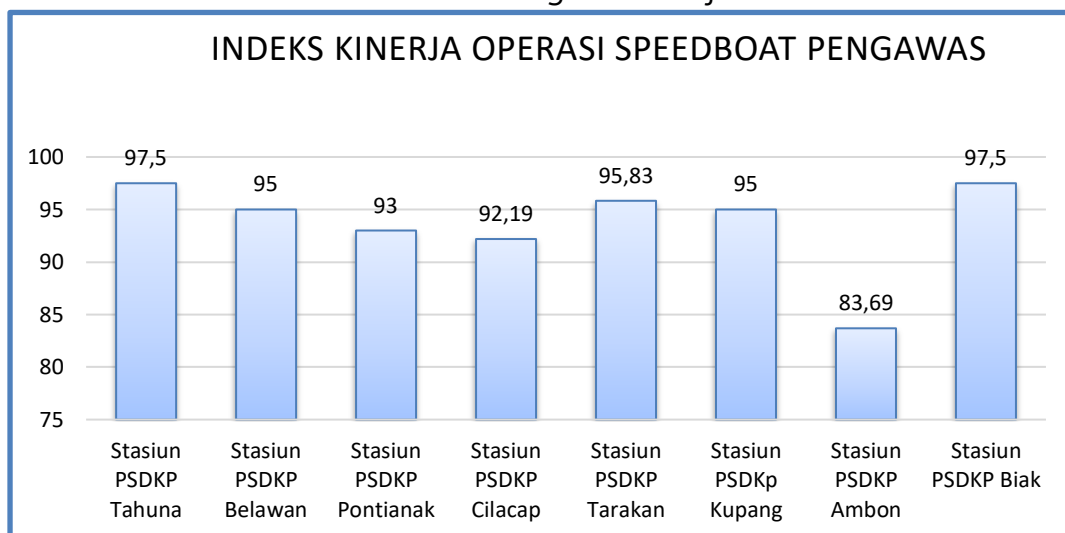
1. Jumlah pemeriksaan kelautan dan perikanan (50%) dengan nilai Napoleon 017 sebesar 50 dan Napoleon 039 sebesar 50, terdiri dari :
 - a. Pemeriksaan kapal perikanan (50%)
 - Napoleon 17 dari target 15 kapal diperiksa dan realisasi 16 kapal diperiksa dengan nilai 53,30.
 - Napoleon 39 dari target 12 kapal diperiksa dan realisasi 12 kapal diperiksa dengan nilai 50,00.
 - b. Pemeriksaan Kelautan (50%)
 - Napoleon 17 dari target 2 pemeriksaan kelautan dan realisasi 3 pemeriksaan kelautan dengan nilai 75,00;
 - Napoleon 39 dari target 2 pemeriksaan kelautan dan realisasi 3 pemeriksaan kelautan dengan nilai 75,00;

2. Persentase cakupan wilayah pengawasan (45%) dengan nilai Napoleon 17 sebesar 40 dan Napoleon 39 sebesar 45,00, terdiri dari :
 - Napoleon 17 dari target 0,00010 dan realisasi 0,00014 dengan nilai 45,00.
 - Napoleon 39 dari target 0,0008 dan realiasi 0,00013 dengan nilai 45,00.
3. Tindak lanjut terget operasi (5%) dengan nilai Napoleon 17 sebesar 5,00 dan Napoleon 39 sebesar 0,00.

Tercapainya target dari variabel pembentuk tersebut yang menjadi faktor keberhasilan dalam pemenuhan indikator kinerja, dengan variabel jumlah kapal yang diperiksa dan pemeriksaan kelautan yang mencapai target.

Adapun perbandingan capaian kinerja "Indeks Operasi Speedboat Pengawas" tahun 2024 dengan UPT sejenis dapat dilihat pada gambar sebagai berikut.

Gambar 6
Perbandingan Capaian "Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas"
Tahun 2025 dengan UPT Sejenis



Berdasarkan perbandingan pada gambar diatas, Stasiun PSDKP Tahuna mendapat capaian yang lebih tinggi dibandingkan dengan 6 UPT lainnya yaitu Stasiun PSDKP Pontianak, Stasiun PSDKP Belawan, Stasiun PSDKP Cilacap, Stasiun PSDKP Kupang, dan Stasiun PSDKP Tarakan dan Stasiun PSDKP

Ambon. Serta mendapatkan nilai yang sama dengan 1 UPT lainnya yaitu Stasiun PSDKP Biak. Diharapkan untuk kedepannya Stasiun PSDKP Tahuna dapat mempertahankan nilai capaian "Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas" agar tetap mendapatkan nilai maksimal, melebihi nilai target yang telah ditentukan.

Gambar 7
Kegiatan Operasi Speedboat Pengawas Tahun 2025



ISK. 6

Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Prasarana dan Sarana Pengawasan SDKP (%)

ISK.6 "Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Prasarana dan Sarana Pengawasan SDKP" ditetapkan sebagai IKU, dengan target persentase pada Tahun 2025 sebesar 100,00%. Target Kinerja ISK.6 "Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Prasarana dan Sarana Pengawasan SDKP" berdasarkan Renstra, adapun informasi dapat dilihat pada Tabel 21. berikut ini.

Tabel 21 Target ISK.6 “Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Prasarana dan Sarana Pengawasan SDKP”

Indikator Sasaran Kinerja	Target 2025 (Tahun Berjalan dan Awal Periode Renstra)	Target 2029
Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Prasarana dan Sarana Pengawasan SDKP	100,00 %	-

Berdasarkan informasi pada tabel diatas, ISK.6 “Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Prasarana dan Sarana Pengawasan SDKP” pada Tahun 2025 yang merupakan tahun berjalan dan awal periode Renstra terdapat target Indeks yang ditetapkan sebesar 100,00. Hingga akhir Tahun 2025, dilakukan pengukuran realisasi berdasarkan target yang telah ditentukan. Adapun Informasi dapat dilihat pada Tabel 22. berikut ini.

Tabel 22 Hasil Capaian ISK.6 “Persentase Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP yang Diselesaikan” Tahun 2025

Indikator Sasaran Kinerja	2024		Persen	2025		Persen
	T	C		T	C	
Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Prasarana dan Sarana Operasi Kapal Pengawas	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Berdasarkan informasi pada tabel diatas, target yang ditetapkan pada Tahun 2025 dengan persentase 100,00% telah tercapai dengan persentase 100,00% dan persentase pada aplikasi *Kinerjaku* sebesar 100,00% berpredikat “Baik”. Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2024 persentase capaian ISK tersebut mendapatkan nilai yang sama serta masih mendapatkan persentase yang sesuai dengan target yang telah ditentukan. Indikator keberhasilan “Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Prasarana dan Sarana Pengawasan SDKP” berdasarkan terlaksananya 3 (Tiga) kegiatan sebagai berikut :

1. Perawatan Preventif (Perawatan Preventif berupa pemeliharaan dan perawatan rutin, KP. Hiu. 15, Speedboat Napoleon 039 dan Speedboat Napoleon 017).
2. Perawatan Prediktif, (Perawatan Prediktif berupa pembelian suku cadang KP. Hiu. 15, Speedboat Napoleon 039 dan Speedboat Napoleon 017), dan
3. Perawatan Darurat, (Pembelian Perawatan Darurat KP. Hiu. 15, Speedboat Napoleon 039 dan Speedboat Napoleon 017).



TERSELENGGARANYA PENANGANAN PELNGGARAN ADMINISTRATIF BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG EFEKTIF DAN SESUAI KETENTUAN

Pencapaian Sasaran Kegiatan "Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan yang Tuntas" pada Tahun 2025 sebesar 100,00% dengan predikat "Baik" dan diidentifikasi ke dalam 2 (dua) ISK, yaitu :



" Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang kelautan dan Perikanan"

ISK.7 "Indeks pengenaan sanki administratif bidang kelautan dan perikanan" ditetapkan sebagai IKU dengan target Indeks pada tahun 2025 sebesar 81,00. Target kinerja "Indeks pengenaan sanki administratif bidang kelautan dan perikanan" berdasarkan Renstra dapat dilihat pada Tabel 24. berikut ini.

Tabel 24
Target ISK.7 "Indeks Pengenaan Sanki Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan" Tahun 2025

Indikator Sasaran Kinerja	Target 2025 (Tahun Berjalan dan Awal Periode Renstra)	Target 2029
Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan	81,00 (Indeks)	-

Berdasarkan informasi pada tabel diatas, ISK.7 "Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan" pada Tahun 2025 yang merupakan tahun berjalan dan awal periode Renstra terdapat target Indeks yang ditetapkan sebesar 81,00. Hingga akhir Tahun 2025, dilakukan pengukuran realisasi berdasarkan target yang telah ditentukan. Adapun informasi dapat dilihat pada **Tabel 25**. berikut ini.

Tabel 25
Hasil Capaian ISK.7 "Indeks Pengenaan Sanki Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan" Tahun 2025

Indikator Sasaran Kinerja	2024		Persen	2025		Persen
	T	C		T	C	
Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan	80,00	80,00	100,00	81,00	81,00	100,00

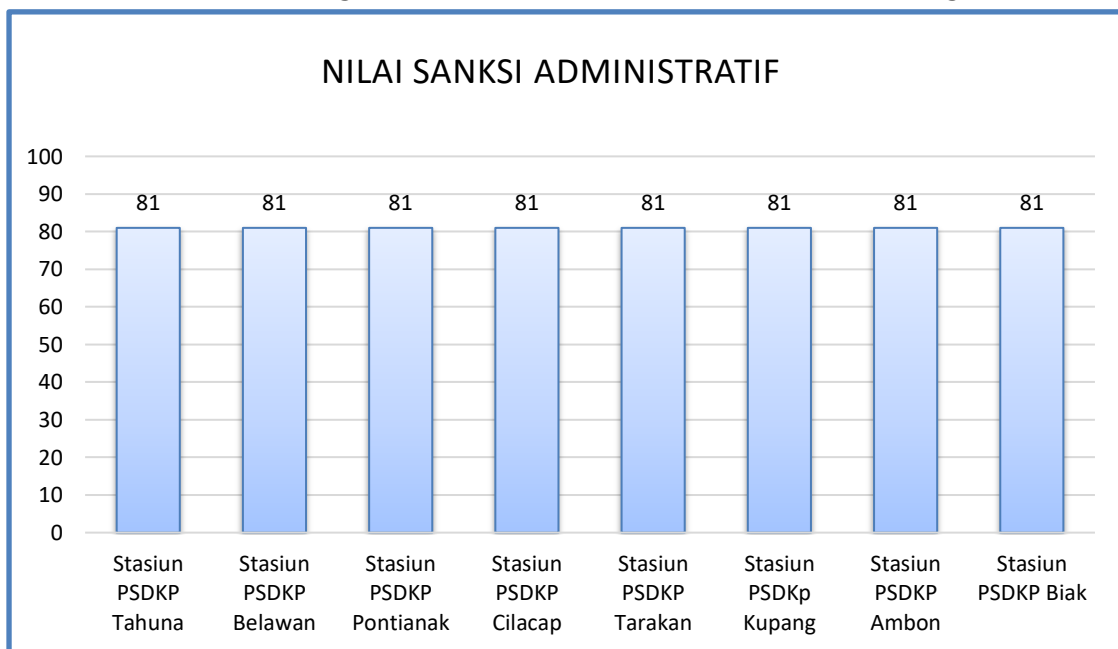
Berdasarkan Informasi pada tabel diatas, target yang ditetapkan pada tahun 2025 dengan nilai Indeks 81,00 telah tercapai dengan nilai indeks 81,00 dan persentase pada aplikasi *Kinerjaku* sebesar 100,00% berpredikat "Baik". Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2024 nilai capaian ISK tersebut memiliki nilai capaian yang sama dan sudah tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Tercapainya Indikator kinerja tersebut dikarenakan terdapat 2 target dan 2 capaian kinerja pada Tahun 2025. Tercapainya "Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan" pada Tahun 2025 ini dikarenakan telah dilakukannya tindak lanjut hasil pengawasan kapal

perikanan yang melakukan pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan dengan diberikannya Surat Teguran I kepada Kapal perikanan yaitu KM. Grasia 03 dan sanksi administrasi berupa denda kepada kapal KM. Burung Kuning 02. Apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya, belum dapat dibandingkan dikarenakan Tahun 2025 merupakan awal periode Renstra sehingga belum terdapat target maupun capaian yang dapat dibandingkan.

Adapun perbandingan capaian kinerja “Indeks penenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan” tahun 2025 dengan UPT sejenis dapat dilihat pada Gambar 8 sebagai berikut.

Gambar 8. Perbandingan Capaian “Indeks Penenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan” Tahun 2025 dengan UPT



Berdasarkan perbandingan pada gambar diatas, Stasiun PSDKP Tahuna mendapatkan capaian yang sama dengan seluruh UPT sejenis, hasil ini menunjukkan bahwa seluruh UPT mendapatkan nilai yang sama dikarenakan target yang ditentukan pada tahun 2025 telah tercapai dengan baik sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Diharapkan Stasiun PSDKP Tahuna dapat mempertahankan dan meningkatkan capaian Indikator Kinerja tersebut pada periode yang akan datang.



"Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan"

"Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan" ditetapkan sebagai IKU dengan target nilai indeks pada tahun 2025 sebesar 81,00 Target Kinerja "Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan" berdasarkan Renstra dapat dilihat pada tabel 32. berikut ini.

Tabel 32
Target ISK.32 "Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan"

Indikator Sasaran Kinerja	Target 2025	Target 2029
Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	81,00 (Nilai)	-

Berdasarkan informasi pada tabel diatas, ISK.8 "Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan" pada Tahun 2025 yang merupakan tahun berjalan dan awal periode Renstra terdapat target Indeks yang ditetapkan sebesar 81,00. Hingga akhir Tahun 2025, dilakukan pengukuran realisasi berdasarkan target yang telah ditentukan. Adapun informasi dapat dilihat pada **Tabel 33**. berikut ini.

Tabel 25
Hasil Capaian "Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan" Tahun 2025

Indikator Sasaran Kinerja	2025 (Nilai Indeks)		Persen	2026		Persen	2027		Persen	2028		Persen	2029		Persen
	T	C		T	C		T	C		T	C		T	C	
Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya	81,00	81,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Indikator Sasaran Kinerja	2025 (Nilai Indeks)		Persen	2026		Persen	2027		Persen	2028		Persen	2029		Persen
	T	C		T	C		T	C		T	C		T	C	
Kelautan dan Perikanan															

Berdasarkan informasi pada tabel diatas, target yang ditetapkan pada tahun 2025 dengan nilai indeks 81,00 telah tercapai dengan nilai indeks 81,00 dan persentase pada aplikasi Kinerja sebesar 100,00% berpredikat "Baik". Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya Indikator tersebut belum dapat dibandingkan karena tahun 2025 merupakan awal periode Renstra sehingga belum terdapat capaian maupun realisasi yang ditentukan.

Indikator keberhasilan dari ISK.8 tersebut adalah dengan ditindaklanjutinya pemeriksaan analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan yang didapatkan dari hasil tracking VMS melalui aplikasi Salmon dan notif dari Direktorat Pengendalian Operasi Armada terkait dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh kapal perikanan di wilayah kerja Stasiun PSDKP Tahuna.

Dari hasil pemantauan terdapat 2 (dua) kapal berbendera Indonesia dengan ukuran diatas 30 GT yang melakukan pelanggaran yaitu dengan menonaktifkan VMS lebih dari 1 X 24 jam. Maka berdasarkan pasal 53 ayat (4) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 Jo Pasal 5 Ayat (3) huruf a Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021 Pasal 7 ayat 1 huruf a tentang Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan telah memenuhi unsur untuk dikenakan peringatan/teguran tertulis kepada kapal perikanan tersebut. Adapun detail pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel. 26 berikut ini.

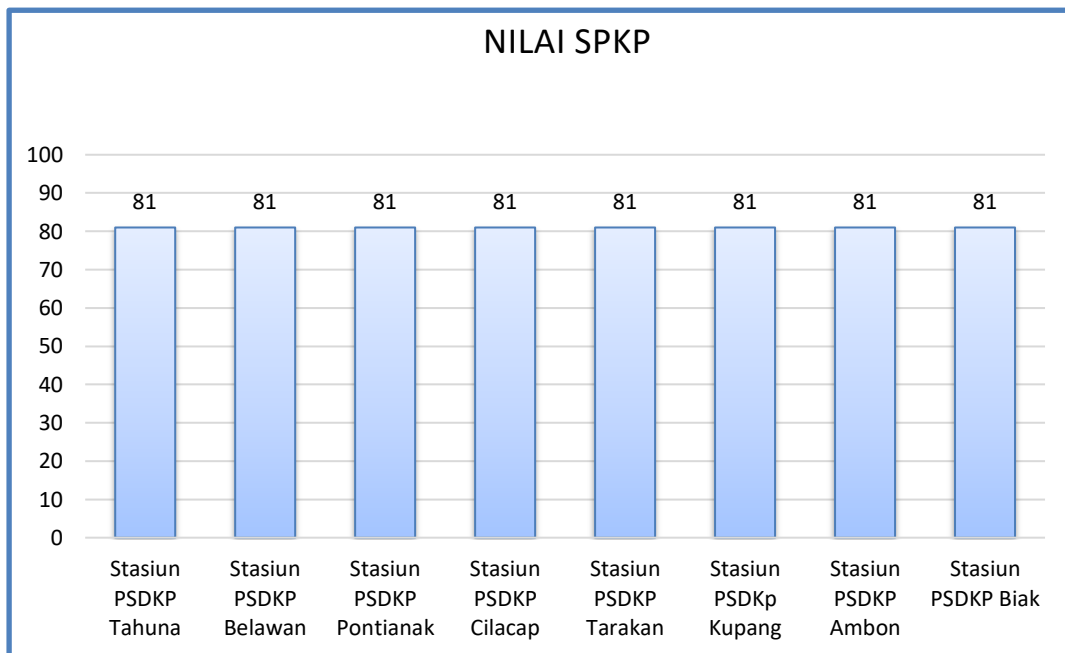
Tabel 26. Data Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Stasiun PSDKP Tahuna Tahun 2025

No	Nama Kapal	Nama Pemilik	Pelanggaran	Tindak Lanjut
1	KM. Grasia 3	Djoni Tamalawe	Menonaktifkan VMS lebih dari 1 X 24 Jam	Diberikan Surat Teguran I
2	KM. Nelayan 2016	Koperasi Perikanan Maming	Menonaktifkan VMS lebih dari 1 X 24 Jam	Diberikan Surat Teguran I

Adapun perbandingan capaian kinerja “Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan” tahun 2025 dengan UPT sejenis dapat dilihat pada gambar sebagai berikut.

Gambar 17

Perbandingan Capaian “Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan” dengan UPT Sejenis Tahun 2025



Berdasarkan perbandingan pada gambar diatas, Stasiun PSDKP Tahuna mendapat capaian yang sama dengan seluruh UPT sejenis dan sesuai dengan target yang ditentukan. Diharapkan Stasiun PSDKP Tahuna dapat memperoleh nilai capaian yang lebih baik pada periode yang akan datang.

**SASARAN
KEGIATAN 6****TERSELENGGARANYA PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG BERKUALITAS**

Pencapaian Sasaran Kegiatan "Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan Yang Efektif dan Sesuai Ketentuan" pada Tahun 2025 belum terdapat target dan capaian yang ditentukan serta diidentifikasi ke dalam 1 (Satu) ISK, yaitu :

ISK.9

"Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan"

ISK.9 "Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan" ditetapkan sebagai IKU dengan target nilai Indeks pada tahun 2025 sebesar 81,00. Adapun informasi dapat dilihat pada Tabel 27. berikut ini.

Tabel 27

Target ISK.9 "Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan"

Indikator Sasaran Kinerja	Tahun 2025 (Tahun Berjalan dan Awal Periode Renstra)	Target 2029
Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan	81,00 (Nilai Indeks)	-

Berdasarkan informasi pada tabel diatas, ISK.9 "Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan" pada Tahun 2025 yang merupakan tahun berjalan dan awal periode Renstra terdapat target Indeks yang ditetapkan sebesar 81,00. Hingga akhir Tahun 2025, telah dilakukan pengukuran realisasi berdasarkan target yang telah ditentukan. Adapun informasi dapat dilihat pada Tabel 28. berikut ini.

Tabel 28
 Hasil Capaian ISK.9 "Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana
 Kelautan dan Perikanan" Tahun 2025

Indikator Sasaran Kinerja	2025		2026		2027		2028		2029		Persen
	T	C	T	C	T	C	T	C	T	C	
Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan	81,00	71,00	-	-	-	-	-	-	-	-	87,65

Berdasarkan Informasi pada tabel diatas, target yang ditetapkan pada Tahun 2025 dengan nilai Indeks 81,00 telah terealisasi sebesar 71,00 dan persentase pada aplikasi Kinerja sebesar 87,65 dengan predikat "Cukup". Realisasi nilai yang didapatkan dari hasil pengukuran kinerja tahun 2025 tidak mencapai target yang telah ditentukan dikarenakan tidak terselesaikannya kasus penyidikan pada tahun berjalan yang sedang dilaksanakan. Pada tahun 2025 terdapat 8 kasus TPKP yang dilaksanakan dengan total 4 Kasus terselesaikan (P21) dan 4 Kasus masih dalam proses penyidikan.

Adapun kasus TPKP yang dilaksanakan pada Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel.29 berikut ini :

Tabel 29. Total Kasus TPKP yang Dilaksanakan pada Tahun 2025

NO.	Nama Kapal / Tersangka TPKP	Jenis Pelanggaran	Perkembangan Tahapan Penyelesaian TPKP
1.	M/BCA Christian Jame / Danny Patok Ganton	Pasal 92 Jo pasal 26 ayat (1) Undang undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang	P21

		Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang, jo Pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHP.	
2.	M/BCA Omrad / Tho Manti Lawag	Pasal 92 Jo pasal 26 ayat (1) Undang undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang, jo Pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHP.	P21
3.	FB LPI 2 / Saturnino Ibanez Pesconez	Pasal 92 Jo pasal 26 ayat (1) Undang undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang, jo Pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHP.	P21
		Pasal 92 Jo pasal 26 ayat (1) Undang undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang	

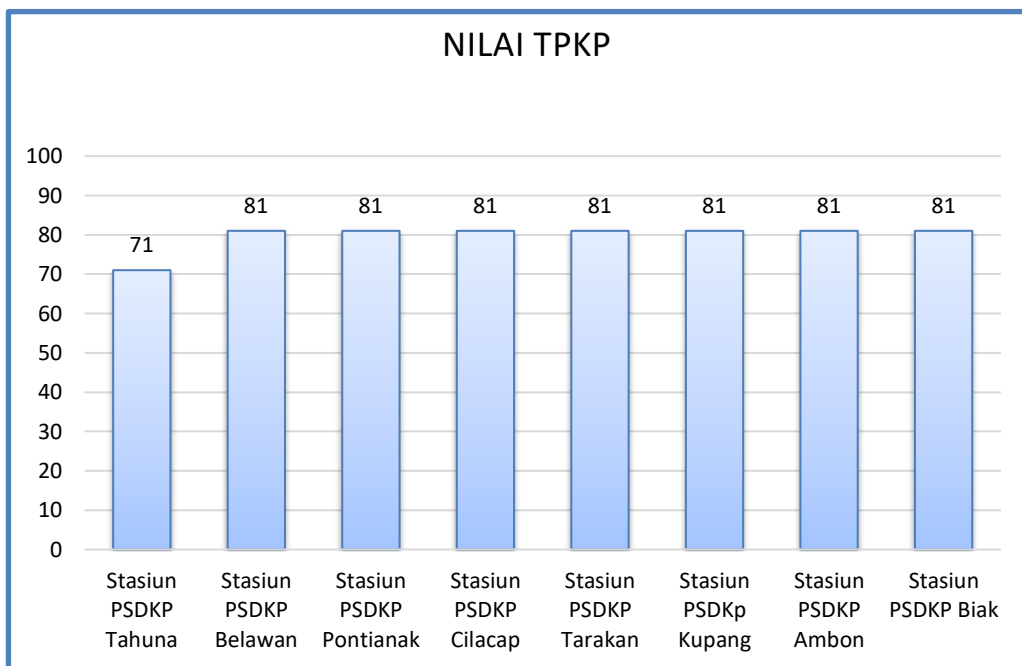
4.	M/BCA Marjilyn / Roel Latot Entayao	Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang, jo Pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHP.	P21
5.	M/BCA Christian Jame / Danny Patok Ganton	Pasal 92 Jo pasal 26 ayat (1) Undang undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang, jo Pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHP.	Dalam Proses Penyidikan
6.	M/BCA Christian Jame / Danny Patok Ganton	Pasal 92 Jo pasal 26 ayat (1) Undang undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan	Dalam Proses Penyidikan

		<p>sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang, jo Pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHP.</p>	
7.	M/BCA Christian Jame / Danny Patok Ganton	<p>Pasal 92 Jo pasal 26 ayat (1) Undang undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang, jo Pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHP.</p>	Dalam Proses Penyidikan
8.	M/BCA Christian Jame / Danny Patok Ganton	<p>Pasal 92 Jo pasal 26 ayat (1) Undang undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022</p>	Dalam Proses Penyidikan

		Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang, jo Pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHP.	
--	--	--	--

Adapun perbandingan capaian kinerja “Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan” pada Tahun 2025 dengan UPT sejenis dapat dilihat pada gambar sebagai berikut.

Gambar 18
Perbandingan Capaian “Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan” dengan UPT Sejenis Tahun 2025



Berdasarkan perbandingan pada gambar diatas, Stasiun PSDKP Tahuna mendapatkan capaian yang lebih rendah dibandingkan dengan seluruh UPT sejenis. Tidak tercapainya nilai Indikator Kinerja tersebut dikarenakan belum terselesaikannya kasus TPKP yang sedang ditangani oleh Stasiun PSDKP Tahuna. Diharapkan Stasiun PSDKP Tahuna dapat meningkatkan nilai capaian Indikator Kinerja tersebut pada periode yang akan datang.

Gambar 19
Kegiatan TPKP pada Tahun 2025



**SASARAN
KEGIATAN 7
KEGIATAN 6**

TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF,
LINCAH DAN AKUNTABEL DALAM PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Pencapaian Sasaran Kegiatan "Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Lincah dan Akuntabel dalam Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan" pada Tahun 2025 sebesar 108,93% berpredikat "Baik" dengan diidentifikasi ke dalam 10 (Sepuluh) ISK, yaitu:



" Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker Stasiun PSDKP Tahuna "

ISK.10 "Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker Stasiun PSDKP Tahuna" ditetapkan sebagai IKM, dengan target nilai pada Tahun 2025 sebesar 71,50. Adapun informasi dapat dilihat pada Tabel 30. berikut ini.

Tabel 30
Target ISK.10 "Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker Stasiun PSDKP Tahuna"

Indikator Sasaran Kinerja	Target 2025 (Tahun Berjalan dan Awal Periode Renstra)	Target 2029
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker Stasiun PSDKP Tahuna	71,50 (Nilai)	-

Berdasarkan informasi pada tabel diatas, ISK.10 "Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) " pada Tahun 2025 yang merupakan tahun berjalan dan awal periode Renstra terdapat target Indeks yang ditetapkan sebesar 71,50. Hingga akhir Tahun 2025, dilakukan pengukuran realisasi berdasarkan target yang telah ditentukan. Adapun informasi dapat dilihat pada **Tabel 31**. berikut ini.

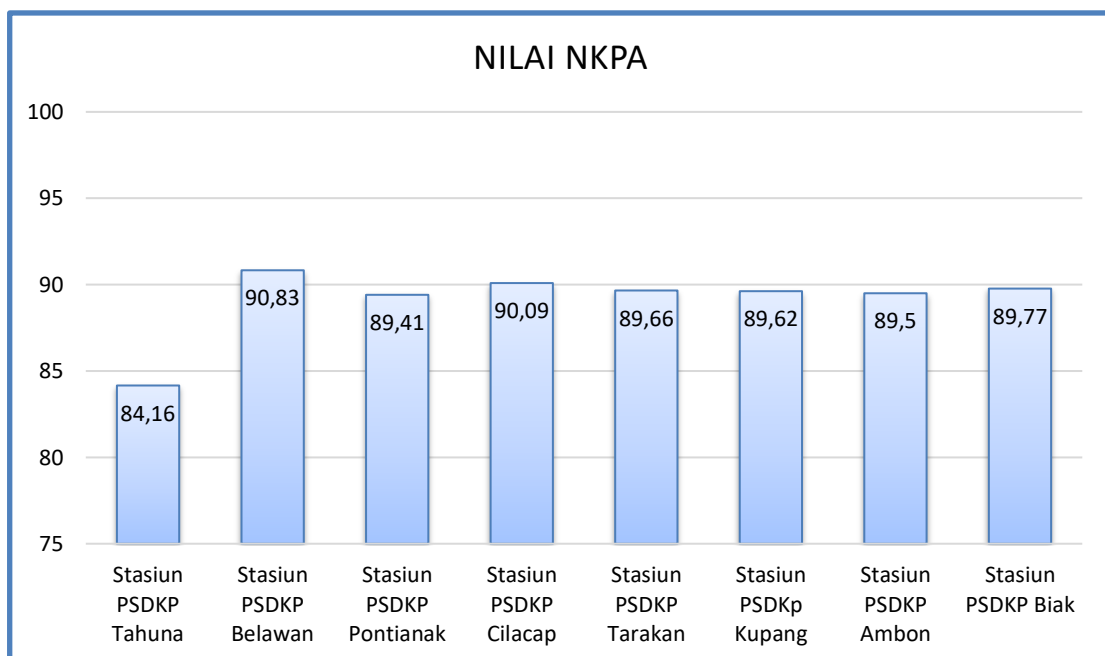
Tabel 31
Hasil Capaian ISK.10 "Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Satker Stasiun PSDKP Tahuna" Tahun 2025

Indikator Sasaran Kinerja	2025		2026		2027		2028		2029		Persen
	T	C	T	C	T	C	T	C	T	C	
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Satker Stasiun PSDKP Tahuna	71,50	84,16	-	-	-	-	-	-	-	-	117,71

Berdasarkan informasi pada tabel diatas, target yang ditetapkan pada tahun 2025 dengan nilai 71,50 telah tercapai dengan nilai 84,16 dan persentase pada aplikasi Kinerjaku sebesar 117,71% dengan predikat "Istimewa". Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya Indikator kinerja

tersebut tidak dapat dibandingkan, dikarenakan tahun 2025 merupakan awal periode Renstra sehingga belum terdapat capaian maupun realisasi yang dapat dibandingkan. Nilai pencapaian didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian antara Capaian RO, Penggunaan SBK dan Efisiensi SBK.

Indikator keberhasilan ISK tersebut adalah kualitas perencanaan anggaran dengan baik, kualitas pelaksanaan anggaran dengan baik, serta kualitas hasil pelaksanaan anggaran yang baik. Adapun perbandingan capaian kinerja "Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Satker Stasiun PSDKP Tahuna" tahun 2025 dengan UPT sejenis dapat dilihat pada gambar sebagai berikut.



Berdasarkan perbandingan pada gambar diatas, Stasiun PSDKP Tahuna mendapat capaian yang lebih rendah dibandingkan dengan UPT sejenis lainnya, akan tetapi nilai tersebut sudah memenuhi target yang telah ditentukan dan mendapatkan nilai capaian dengan predikat "Istimewa".. Diharapkan Stasiun PSDKP Tahun dapat meningkatkan nilai capaian ISK "Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) lingkup Stasiun PSDKP Tahuna" pada periode yang akan datang.



*"Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker
Lingkup Stasiun PSDKP Tahuna "*

ISK.11 "Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker Lingkup Stasiun PSDKP Tahuna" ditetapkan sebagai IKM, dengan target nilai pada Tahun 2025 sebesar 92,00. Adapun informasi dapat dilihat pada Tabel 32. berikut ini.

Tabel 32
Target ISK.11 "Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PSDKP Tahuna"

Indikator Sasaran Kinerja	Target 2025 (Tahun Berjalan)	Target 2029
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker Lingkup Stasiun PSDKP Tahuna	92,00 (Nilai)	-

Berdasarkan informasi pada tabel diatas, ISK.11 "Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker Lingkup Stasiun PSDKP Tahuna" pada Tahun 2025 yang merupakan tahun berjalan dan awal periode Renstra terdapat target Indeks yang ditetapkan sebesar 92,00. Hingga akhir Tahun 2025, dilakukan pengukuran realisasi berdasarkan target yang telah ditentukan. Adapun informasi dapat dilihat pada **Tabel 33**. berikut ini.

Tabel 33
Hasil Capaian ISK.11 "Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker Lingkup Stasiun PSDKP Tahuna" Tahun 2025

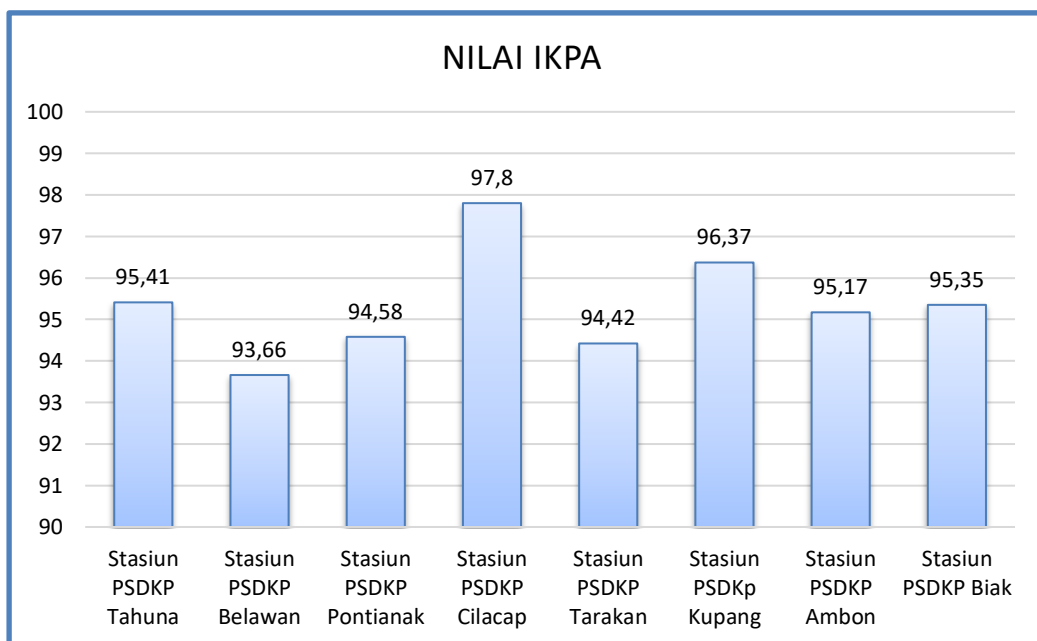
Indikator Sasaran Kinerja	2024		Persen	2025		Persen
	T	C		T	C	
Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan	93,76	93,78	100,02	92,00	95,41	103,71

Berdasarkan informasi pada tabel diatas, target yang ditetapkan pada tahun 2025 dengan nilai 92,00 telah tercapai dengan nilai 95,41 dan persentase pada aplikasi Kinerjaaku sebesar 103,71 dengan predikat "Baik". Nilai tersebut

diperoleh dari ketaatan dan ketepatan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan hasil pelaksanaan anggaran. Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2024 nilai capaian ISK tersebut mengalami kenaikan dimana nilai capaian ISK tersebut lebih tinggi dari capaian tahun sebelumnya. Meskipun demikian nilai capaian ISK tersebut telah tercapai dan melebihi nilai target yang telah ditentukan pada setiap tahunnya.

Indikator keberhasilan ISK tersebut adalah kualitas perencanaan anggaran dengan baik, kualitas pelaksanaan anggaran dengan baik, serta kualitas hasil pelaksanaan anggaran yang baik. Adapun perbandingan capaian kinerja "Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker Stasiun PSDKP Tahuna" tahun 2025 dengan UPT sejenis dapat dilihat pada gambar sebagai berikut.

Adapun perbandingan capaian kinerja "Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker Lingkup Stasiun PSDKP Tahuna" tahun 2025 dengan UPT sejenis dapat dilihat pada Gambar sebagai berikut.



Berdasarkan perbandingan pada gambar diatas, Stasiun PSDKP Tahuna mendapat capaian yang lebih tinggi dari 5 UPT dan lebih rendah dari 2 UPT sejenis lainnya, akan tetapi nilai tersebut sudah melebihi target yang telah ditentukan dan mendapatkan nilai capaian dengan predikat "Baik".

Diharapkan Stasiun PSDKP Tahuna dapat mempertahankan dan meningkatkan nilai capaian ISK "Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun PSDKP Tahuna" pada periode yang akan datang.

ISK.12 "Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PSDKP Tahuna"

ISK.12 "Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PSDKP Tahuna" ditetapkan sebagai IKM, dengan target nilai Indeks pada Tahun 2025 sebesar 81,00. Adapun informasi dapat dilihat pada Tabel 34. berikut ini.

Tabel 34
Target ISK.12 "Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PSDKP Tahuna" Tahun 2025

Indikator Sasaran Kinerja	Target 2025 (Tahun Berjalan)	Target 2029
Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PSDKP Tahuna	81,00	-

Berdasarkan informasi pada tabel diatas, ISK.12 "Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PSDKP Tahuna" pada Tahun 2025 yang merupakan tahun berjalan dan awal periode Renstra terdapat target Indeks yang ditetapkan sebesar 81,00. Hingga akhir Tahun 2025, dilakukan pengukuran berdasarkan target yang telah ditentukan. Adapun informasi dapat dilihat pada **Tabel 35.** berikut ini.

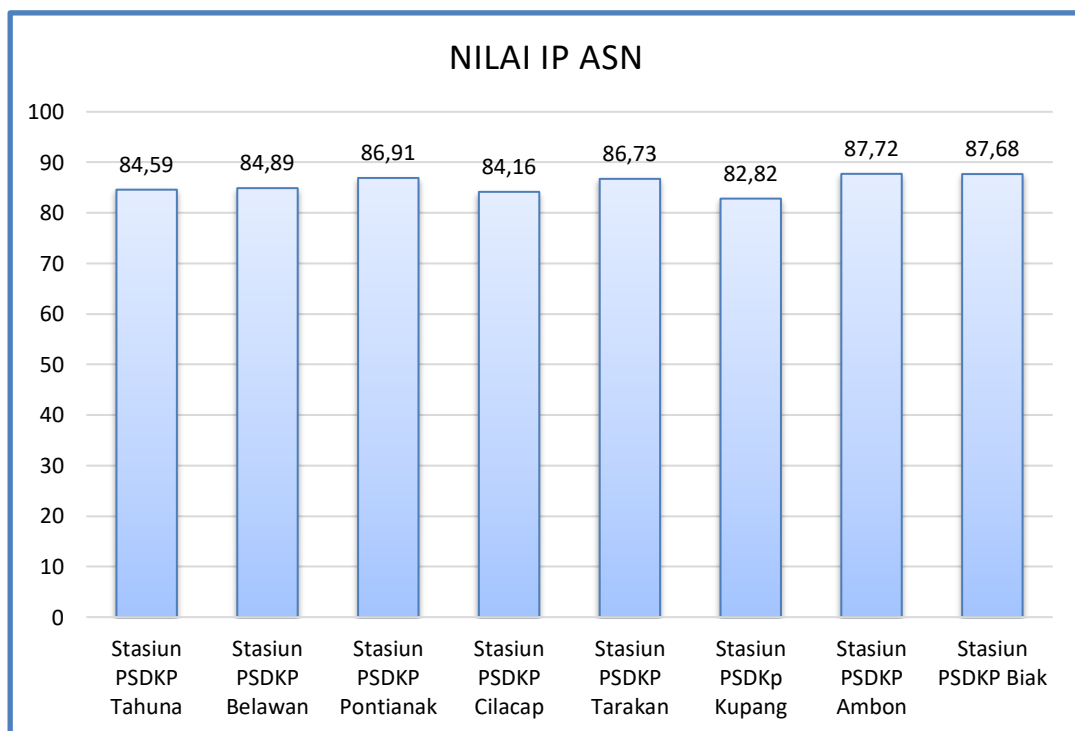
Tabel 35
Hasil Capaian ISK.12 "Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PSDKP Tahuna" Tahun 2025

Indikator Sasaran Kinerja	2024		Persen	2025		Persen
	T	C		T	C	
Indeks Profesionalitas ASN Stasiun PSDKP Tahuna	82,00	83,93	102,35	81,00	84,59	104,43

Berdasarkan informasi pada tabel diatas, target yang ditetapkan pada tahun 2025 dengan nilai Indeks 81,00 telah tercapai dengan nilai Indeks 84,59 dan persentase pada aplikasi *Kinerjaku* sebesar 104,43 berpredikat "Baik". Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2024 nilai capaian ISK tersebut mengalami kenaikan dimana nilai capaian ISK tersebut lebih tinggi dari capaian tahun sebelumnya. Meskipun demikian nilai capaian ISK tersebut telah tercapai dan melebihi nilai target yang telah ditentukan pada setiap tahunnya

Indikator keberhasilan ISK tersebut adalah dengan aktifnya peran pegawai Stasiun PSDKP Tahuna dalam mengikuti beberapa kegiatan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, seminar, dan workshop baik terkait tugas pokok maupun tugas tambahan dari masing-masing pegawai. Selain itu, meningkatnya kompetensi pegawai dari segi teknis dan manajerial untuk menunjang kegiatan Stasiun PSDKP Tahuna.

Adapun perbandingan capaian kinerja "Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Tahuna" tahun 2024 dengan UPT sejenis dapat dilihat pada gambar sebagai berikut.



Berdasarkan perbandingan pada gambar diatas, Stasiun PSDKP Tahuna mendapat nilai capaian lebih baik dari 2 UPT dan lebih rendah dari 5 UPT lainnya, namun masih mendapatkan nilai melebihi target yang telah ditentukan. Diharapkan Stasiun PSDKP Tahuna dapat meningkatkan nilai capaian ISK "Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Tahuna" dengan setiap pegawai lebih aktif dalam mengikuti Diklat/Bimtek/Seminar yang dapat meningkatkan nilai Profesionalitas ASN yang diadakan baik dari pihak BDA atau instansi penyelenggara lainnya, sehingga setiap personil pegawai dapat melaksanakan Diklat/Bimtek/Seminar paling sedikit 20 JP dalam setiap triwulannya.



" Penilaian Mandiri SAKIP Stasiun PSDKP Tahuna "

ISK.13 "Penilaian Mandiri SAKIP Stasiun PSDKP Tahuna" ditetapkan sebagai IKM dengan target nilai pada tahun 2025 sebesar 86,00. Target Kinerja "Penilaian Mandiri SAKIP Stasiun PSDKP Tahuna" berdasarkan Renstra dapat dilihat pada tabel 36. berikut ini.

Tabel 36
Target ISK.13 "Penilaian Mandiri SAKIP Stasiun PSDKP Tahuna"

Indikator Sasaran Kinerja	Target 2025 (Tahun Berjalan dan Awal Periode Renstra)	Target 2029
Penilaian Mandiri SAKIP Stasiun PSDKP Tahuna	86,00 (Nilai)	-

Berdasarkan informasi pada tabel diatas, ISK.13 "Penilaian Mandiri SAKIP Stasiun PSDKP Tahuna" pada Tahun 2025 yang merupakan tahun berjalan dan awal periode Renstra terdapat target Indeks yang ditetapkan sebesar 86,00. Hingga akhir Tahun 2025, dilakukan pengukuran kinerja berdasarkan target yang telah ditentukan. Adapun informasi dapat dilihat pada **Tabel 37**. berikut ini.

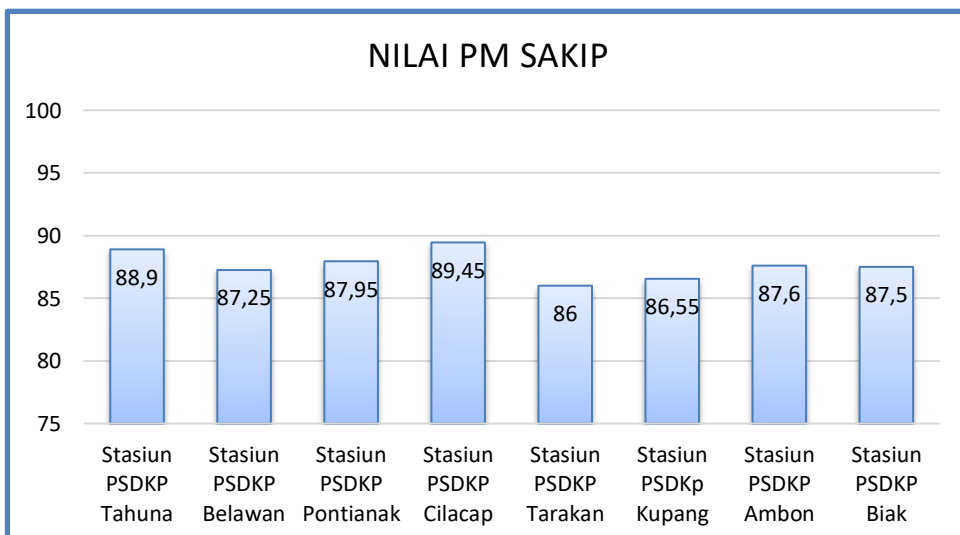
Tabel 37
 Hasil Capaian ISK.13 "Penilaian Mandiri SAKIP Stasiun PSDKP Tahuna"
 Tahun 2025

Indikator Sasaran Kinerja	2024		Persen	2025		Persen
	T	C		T	C	
Indeks Profesionalitas ASN Stasiun PSDKP Tahuna	84,00	87,20	103,81	86,00	88,90	103,37

Berdasarkan informasi pada tabel diatas, target yang ditetapkan pada tahun 2025 dengan nilai 86,00 telah tercapai dengan nilai 88,90 dan persentase pada aplikasi Kinerjaaku sebesar 103,37% berpredikat "Baik". Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2024 nilai capaian ISK tersebut mengalami sedikit penurunan akan tetapi nilai capaian tersebut masih melebihi dengan nilai target yang telah ditetapkan pada setiap tahunnya.

Indikator keberhasilan ISK tersebut adalah nilai evaluasi implementasi pelaksanaan SAKIP mendapatkan predikat A (Memuaskan). Selain itu, mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil sehingga dapat mendorong unit kerja untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja yang telah direncanakan.

Adapun perbandingan capaian kinerja "Penilaian Mandiri SAKIP Stasiun PSDKP Tahuna" tahun 2025 dengan UPT sejenis dapat dilihat pada gambar sebagai berikut.



Berdasarkan perbandingan pada gambar diatas, Stasiun PSDKP Tahuna mendapat capaian lebih baik dari hampir seluruh UPT sejenis kecuali Stasiun PSDKP Cilacap. Diharapkan Stasiun PSDKP Tahuna dapat mempertahankan dan meningkatkan nilai capaian “Penilaian Mandiri SAKIP Stasiun PSDKP Tahuna” untuk periode yang akan datang.

ISK.14 " *Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Lingkup Stasiun PSDKP Tahuna*"

ISK.14 “Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Lingkup Stasiun PSDKP Tahuna” ditetapkan sebagai IKM, dengan target persentase pada Tahun 2025 sebesar 100,00%. Target Kinerja “Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Tahuna” berdasarkan Renstra dapat dilihat pada Tabel 38. berikut ini.

Tabel 38
Target ISK.14 “Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Tahuna”

Indikator Sasaran Kinerja	Target 2025 (Tahun Berjalan dan Awal Periode Renstra)	Target 2029
Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Lingkup Stasiun PSDKP Tahuna	100,00%	-

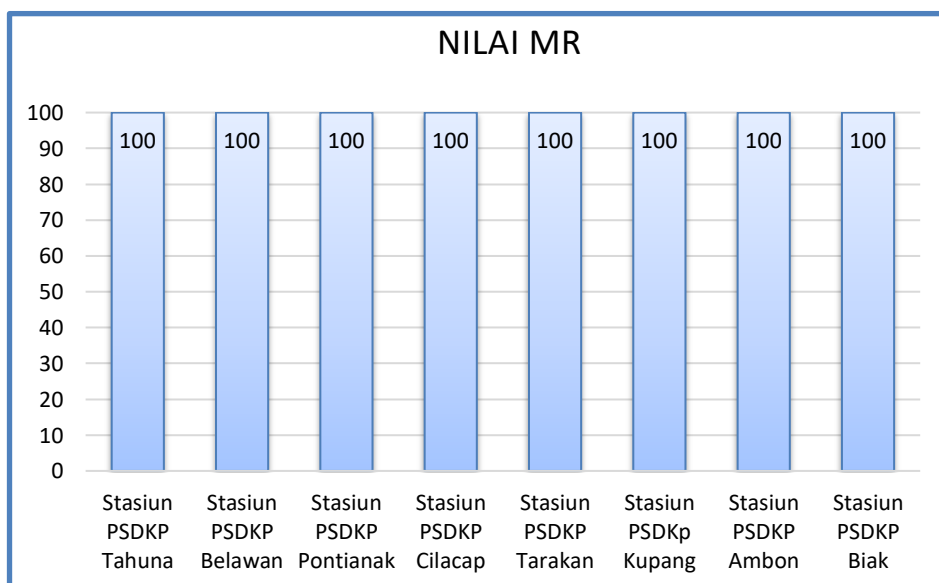
Berdasarkan informasi pada tabel diatas, ISK.14 “Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Lingkup Stasiun PSDKP Tahuna” pada Tahun 2025 yang merupakan tahun berjalan dan awal periode Renstra terdapat target Persentase yang ditetapkan sebesar 100,00%. Hingga akhir Tahun 2025, dilakukan pengukuran realisasi berdasarkan target yang telah ditentukan. Adapun informasi dapat dilihat pada **Tabel 39**. berikut ini

Tabel 39
 Hasil Capaian ISK.14 "Persentase Pelaksanaan Pengendalian
 Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Lingkup Stasiun PSDKP Tahuna"
 Tahun 2025

Indikator Sasaran Kinerja	2024		Persen	2025		Persen
	T	C		T	C	
Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Unit Kerja Lingkup Stasiun PSDKP Tahuna	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Berdasarkan informasi pada tabel diatas, target yang ditetapkan pada Tahun 2025 dengan persentase 100,00% telah tercapai dengan persentase sebesar 100,00% dan persentase pada aplikasi *Kinerjaku* sebesar 100,00% berpredikat "Baik". Apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2024 nilai capaian ISK tersebut telah tercapai dengan baik dan sesuai dengan nilai target yang telah ditentukan.

Indikator keberhasilan ISK tersebut adalah dengan telah dilakukan penilaian pemilik risiko dan ditindaklanjutinya seluruh rekomendasi tindak lanjut risiko yang terdapat pada matriks manajemen risiko. Adapun perbandingan capaian kinerja "Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Tahuna" tahun 2025 dengan UPT sejenis dapat dilihat pada gambar sebagai berikut.



Berdasarkan perbandingan pada gambar diatas, Stasiun PSDKP Tahuna mendapat capaian yang sama dengan seluruh UPT sejenis dan mencapai target yang ditentukan. Diharapkan Stasiun PSDKP Tahuna dapat mempertahankan performa dalam Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Tahuna.



" Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Stasiun PSDKP Tahuna yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan "

ISK.15 "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Stasiun PSDKP Tahuna yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan" ditetapkan sebagai IKM, dengan target persentase pada Tahun 2025 sebesar 95,00%. Adapun informasi dapat dilihat pada Tabel 40. berikut ini.

Tabel 40
Target ISK.15 "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Stasiun PSDKP Tahuna yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan"

Indikator Sasaran Kinerja	Target 2025 (Tahun Berjalan dan Awal Periode Renstra)	Target 2029
Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Stasiun PSDKP Tahuna yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan	95,00%	-

Pada Tahun 2025, yang merupakan tahun berjalan dan awal periode Renstra terdapat target persentase yang ditetapkan sebesar 95,00%. Adapun informasi dapat dilihat pada Tabel 41. berikut ini.

Tabel 41
 Hasil Capaian ISK.15 "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil
 Pengawasan Lingkup Stasiun PSDKP Tahuna yang Dokumen Tindak
 Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan" Tahun 2025

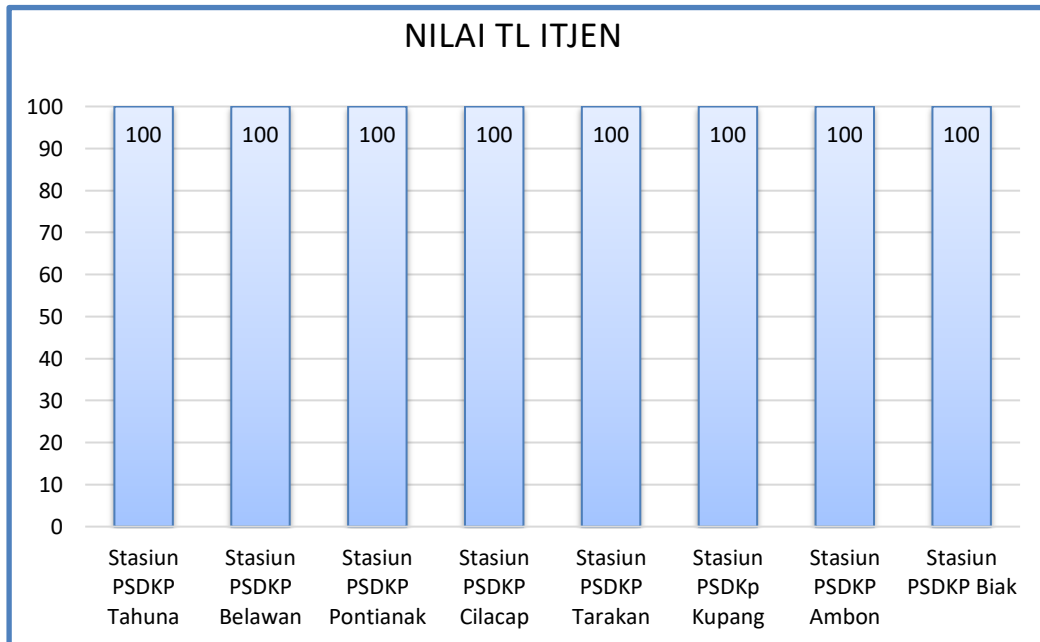
Indikator Sasaran Kinerja	2024		Persen	2025		Persen
	T	C		T	C	
Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Stasiun PSDKP Tahuna yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00

Berdasarkan informasi pada tabel diatas, target yang ditetapkan pada Tahun 2025 dengan persentase 95,00% telah tercapai dengan persentase sebesar 100,00% dengan persentase pada aplikasi *Kinerjaku* sebesar 105,26% berpredikat "Baik". Perhitungan ini didapatkan dari perhitungan jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti. Pada Tahun 2025 terdapat rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti dan telah diselesaikan dengan demikian persentase sesuai dengan target sebagaimana yang dijelaskan dalam manual IKU.

Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2024 nilai capaian ISK tersebut memiliki nilai capaian yang sama dan melebihi nilai target yang telah ditentukan. Diharapkan nilai capaian tersebut dapat dipertahankan dan ditingkatkan untuk periode yang akan datang.

Indikator keberhasilan ISK tersebut dengan terselesainya pemenuhan data dukung hasil pemeriksaan yang harus ditindaklanjuti. Adapun perbandingan capaian kinerja "Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Tahuna yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan" tahun 2025 dengan UPT sejenis dapat dilihat pada gambar sebagai berikut.

Gambar 26
Perbandingan Capaian “Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Tahuna yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan” dengan UPT Sejenis Tahun 2025



Berdasarkan perbandingan pada gambar diatas, Stasiun PSDKP Tahuna mendapat capaian yang sama dengan seluruh UPT sejenis dan mencapai target yang ditentukan. Diharapkan Stasiun PSDKP Tahuna dapat mempertahankan dan meningkatkan nilai capaian “Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Tahuna yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan” pada periode yang akan datang.



“Nilai Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik Unit Kerja Lingkup Stasiun PSDKP Tahuna”

ISK.16 “Nilai Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik Unit Kerja Lingkup Stasiun PSDKP Tahuna” ditetapkan sebagai IKM, dengan target Nilai pada Tahun 2025 sebesar 80,00. Adapun informasi dapat dilihat pada Tabel 42. berikut ini.

Tabel 42

Target ISK.16 "Nilai Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik Unit Kerja Lingkup Stasiun PSDKP Tahuna"

Indikator Sasaran Kinerja	Target 2025 (Tahun Berjalan dan Awal Periode Renstra)	Target 2029
Nilai Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik Unit Kerja Lingkup Stasiun PSDKP Tahuna	80,00	-

Pada Tahun 2025, yang merupakan tahun berjalan dan awal periode Renstra terdapat target Nilai sebesar 80,00. Adapun informasi dapat dilihat pada Tabel 43. berikut ini.

Tabel 43

Hasil Capaian ISK.16 " Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik Lingkup Stasiun PSDKP Tahuna" Tahun 2025

Indikator Sasaran Kinerja	2024		Persen	2025		Persen
	T	C		T	C	
Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik Lingkup Stasiun PSDKP Tahuna	80,00	90,51	113,14	80,00	92,95	116,19

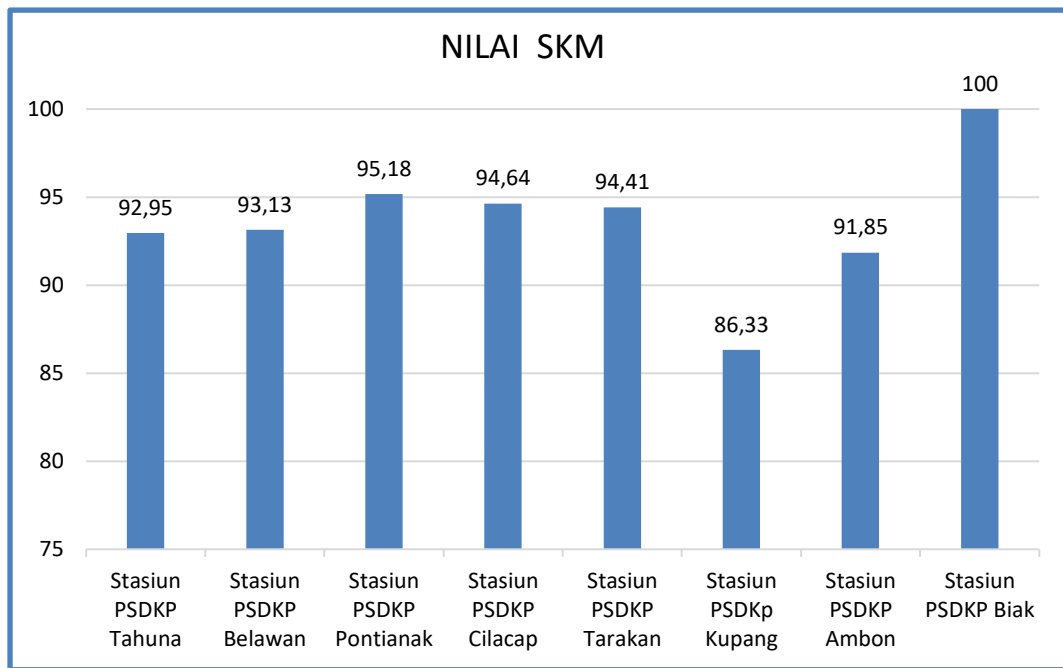
Berdasarkan informasi pada tabel diatas, target yang ditetapkan pada Tahun 2025 dengan nilai Indeks 80,00 telah tercapai dengan nilai indeks 92,95 dengan persentase pada aplikasi *Kinerjaku* sebesar 116,19% berpredikat "Istimewa". Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024 nilai capaian ISK tersebut lebih tinggi, namun nilai capaian ISK tersebut telah tercapai dengan baik dan melebihi nilai target yang telah ditentukan pada setiap tahunnya.

Indikator keberhasilan dari ISK tersebut adalah tingkat kepuasan masyarakat dalam pelayanan Standar Laik Operasi yang menunjukkan pencapaian nilai setiap tahunnya. Nilai tersebut didapat dari survei kepuasan masyarakat yang dilaksanakan periode triwulan IV tahun 2025 melalui aplikasi

SISUSAN.

Adapun perbandingan capaian kinerja “Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan SLO (Standar Laik Operasi) kapal perikanan lingkup Stasiun PSDKP Tahuna” tahun 2025 dengan UPT sejenis dapat dilihat pada gambar sebagai berikut.

Gambar 20
Perbandingan Capaian “Nilai Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik” dengan UPT Sejenis Tahun 2025



Berdasarkan perbandingan pada gambar diatas, Stasiun PSDKP Tahuna mendapat capaian lebih baik dari 2 UPT sejenis yaitu Stasiun PSDKP Ambon dan Stasiun PSDKP Kupang dan lebih rendah dari 5 UPT lainnya yaitu UPT Stasiun PSDKP Biak, Stasiun PSDKP Tarakan, Stasiun PSDKP Pontianak, Stasiun PSDKP Cilacap, dan Stasiun PSDKP Belawan. Meskipun demikian seluruh UPT mendapatkan nilai yang melebihi target yang telah ditentukan. Diharapkan Stasiun PSDKP Tahuna dapat mempertahankan dan lebih meningkatkan performa dalam Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan SLO (Standar Laik Operasi) kapal perikanan lingkup Stasiun PSDKP Tahuna.

Perhitungan ini didapatkan melalui Survei Kepuasan Masyarakat yang

dilaksanakan pada Triwulan IV Tahun 2025 di Stasiun PSDKP Tahuna yang dihitung melalui hasil survei dari penerima layanan SLO Kapal Perikanan lingkup Stasiun PSDKP Tahuna dengan jumlah 13 (tiga belas) responden.

ISK.17 " Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Stasiun PSDKP Tahuna "

ISK.17 "Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Stasiun PSDKP Tahuna" ditetapkan sebagai IKM, dengan target nilai pada Tahun 2025 sebesar 75,00. Adapun informasi dapat dilihat pada Tabel 46. Berikut ini.

Tabel 46
Target ISK.17 "Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Stasiun PSDKP Tahuna"

Indikator Sasaran Kinerja	Target 2025 (Tahun Berjalan dan Awal Periode Renstra)	Target 2029
Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Stasiun PSDKP Tahuna	75,00	-

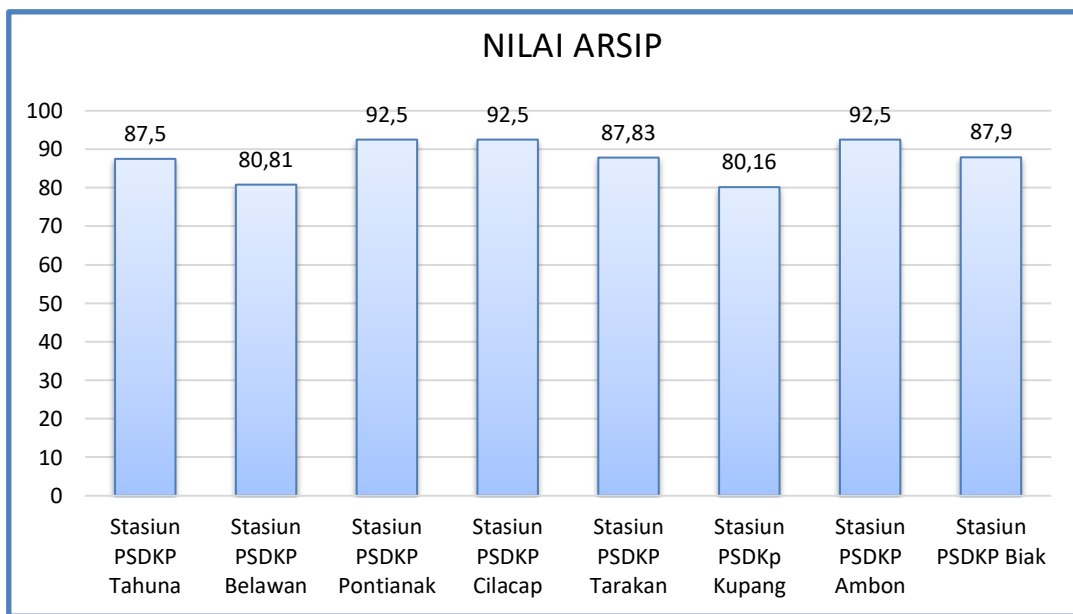
Berdasarkan informasi pada tabel diatas, ISK.17 "Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Stasiun PSDKP Tahuna" pada Tahun 2025 yang merupakan tahun berjalan dan awal periode Renstra terdapat target nilai yang ditetapkan sebesar 75,00. Adapun informasi dapat dilihat pada Tabel 47. berikut ini.

Tabel 47
Hasil Capaian ISK.17 "Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Stasiun PSDKP Tahuna" Tahun 2025

Indikator Sasaran Kinerja	2024		Persen	2025		Persen
	T	C		T	C	
Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Stasiun PSDKP Tahuna	75,00	83,67	111,56	75,00	87,50	116,67

Berdasarkan informasi pada tabel diatas, target yang ditetapkan pada tahun 2025 dengan nilai 75,00 telah tercapai dengan nilai 87,50 dan persentase pada aplikasi *Kinerjaku* sebesar 116,67% dengan predikat "Istimewa". Apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2024 nilai capaian ISK tersebut mendapatkan nilai yang lebih tinggi, namun capaian ISK tersebut telah tercapai dan melebihi nilai target yang telah ditentukan pada setiap tahunnya. Indikator keberhasilan ISK tersebut adalah dengan terpenuhinya kelengkapan data dukung Form ASKI yang menunjang nilai capaian ISK tersebut

Adapun perbandingan capaian kinerja "Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Ditjen PSDKP" tahun 2025 dengan UPT sejenis dapat dilihat pada gambar sebagai berikut



mendapat capaian yang lebih rendah dari 5 UPT dan lebih tinggi dari 2 UPT lainnya dan mendapatkan nilai capaian melebihi target yang telah ditentukan. Diharapkan Stasiun PSDKP Tahuna dapat mempertahankan dan meningkatkan performa dalam capaian kinerja "Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Ditjen PSDKP" pada periode yang akan datang.



"Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan Stasiun PSDKP Tahuna"

ISK.18 "Inovasi Pelayanan Publik Yang Diterapkan Pada Unit Kerja Stasiun PSDKP Tahuna" ditetapkan sebagai IKM, dengan target nilai pada Tahun 2025 sebesar 77,00. Adapun informasi dapat dilihat pada Tabel 48. berikut ini.

Tabel 48
Target ISK.18 "Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan Stasiun PSDKP Tahuna"

Indikator Sasaran Kinerja	Target 2025 (Tahun Berjalan dan Awal Periode Renstra)	Target 2029
Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan Stasiun PSDKP Tahuna	77,00 (Nilai)	-

Berdasarkan informasi pada tabel diatas, ISK.18 "Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan Stasiun PSDKP Tahuna" pada Tahun 2025 yang merupakan tahun berjalan dan awal periode Renstra terdapat target nilai yang ditetapkan sebesar 77,00 dan capaian sebesar 79,73. Adapun informasi dapat dilihat pada Tabel 49. berikut ini.

Tabel 49
Hasil Capaian ISK. 18 "Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan Stasiun PSDKP Tahuna" Tahun 2025

Indikator Sasaran Kinerja	2024		Persen	2025		Persen
	T	C		T	C	
Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan Stasiun PSDKP Tahuna	1,00	1,00	1,00	77,00	79,73	103,55

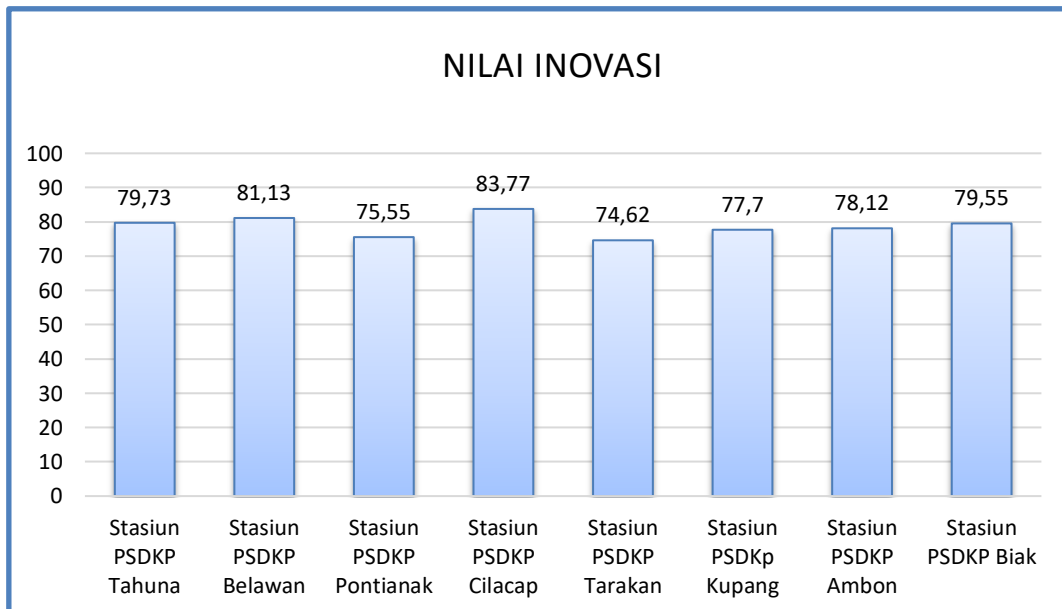
Berdasarkan informasi pada tabel diatas, target nilai yang telah ditetapkan pada tahun 2025 sebesar 77,00 telah tercapai dengan nilai 79,73 dan persentase pada aplikasi Kinerjaku sebesar 103,55% dengan predikat "Baik". Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2024 nilai capaian ISK tersebut tidak dapat dibandingkan, dikarenakan memiliki perbedaan pada nilai target yang

ditentukan. Meskipun demikian nilai capaian ISK tersebut telah tercapai dengan baik pada setiap tahunnya.

Indikator keberhasilan ISK tersebut adalah tersusunnya Inovasi pelayanan publik Stasiun PSDKP Tahuna yaitu "SIAPKAN" Sistem Informasi Barcode Kapal Perikanan tujuan dari Inovasi tersebut adalah untuk mempermudah tim pengawasan dalam melakukan pemeriksaan dokumen kapal perikanan pada saat sedang melakukan patroli pengawasan. Implementasi inovasi tersebut dengan menempelkan Barcode pada badan kapal, jika ingin dilakukan pemeriksaan tim pengawas hanya perlu melakukan scan pada barcode tersebut dan dokumen kapal akan muncul pada file barcode kapal perikanan yang dilakukan pengecekan.

Adapun perbandingan capaian kinerja "Inovasi Pelayanan Publik Yang Diterapkan Pada Unit Kerja Stasiun PSDKP Tahuna" tahun 2025 dengan UPT sejenis dapat dilihat pada gambar sebagai berikut.

Gambar 28
Perbandingan Capaian "Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan Pada Unit Kerja Stasiun PSDKP Tahuna" dengan UPT Sejenis Tahun 2025



Berdasarkan perbandingan tersebut, Stasiun PSDKP Tahuna mendapat capaian yang lebih tinggi dari 5 UPT dan lebih rendah dari 2 UPT lainnya,

namun nilai capaian Indikator kinerja tersebut sudah tercapai dengan baik dan melebihi dari target yang telah ditentukan. Diharapkan Stasiun PSDKP Tahuna dapat mempertahankan dan meningkatkan nilai capaian ISK "Inovasi Pelayanan Publik Yang Diterapkan Pada Unit Kerja Stasiun PSDKP Tahuna" dengan dapat menciptakan inovasi baru ataupun tetap melaksanakan dan melanjutkan Inovasi yang sudah dibuat pada tahun sebelumnya agar dapat meningkatkan dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

ISK.19 " *Nilai Implementasi Program Budaya Kerja* "

ISK.19 "Nilai Implementasi Program Budaya Kerja" ditetapkan sebagai IKM, dengan target nilai pada Tahun 2025 sebesar 70,00. Target Kinerja "Nilai implementasi program budaya kerja" berdasarkan Renstra dapat dilihat pada pada Tabel 50. berikut ini.

Tabel 50
Target ISK.19 "Nilai Implementasi Program Budaya Kerja"

Indikator Sasaran Kinerja	Target 2025 (Tahun Berjalan dan Awal Periode Renstra)	Target 2029
Nilai Implementasi Program Budaya Kerja Lingkup	70,00	-

Berdasarkan informasi pada tabel diatas, ISK.19 "Nilai Implementasi Program Budaya Kerja" pada Tahun 2025 yang merupakan tahun berjalan dan awal periode Renstra terdapat target yang ditetapkan Nilai sebesar 70,00. Hingga akhir tahun 2025 dilakukan pengukuran realisasi berdasarkan target yang telah ditentukan. Adapun informasi dapat dilihat pada Tabel 51. berikut ini

Tabel 51
 Hasil Capaian ISK.19 “Nilai Implementasi Program Budaya Kerja”
 Tahun 2025

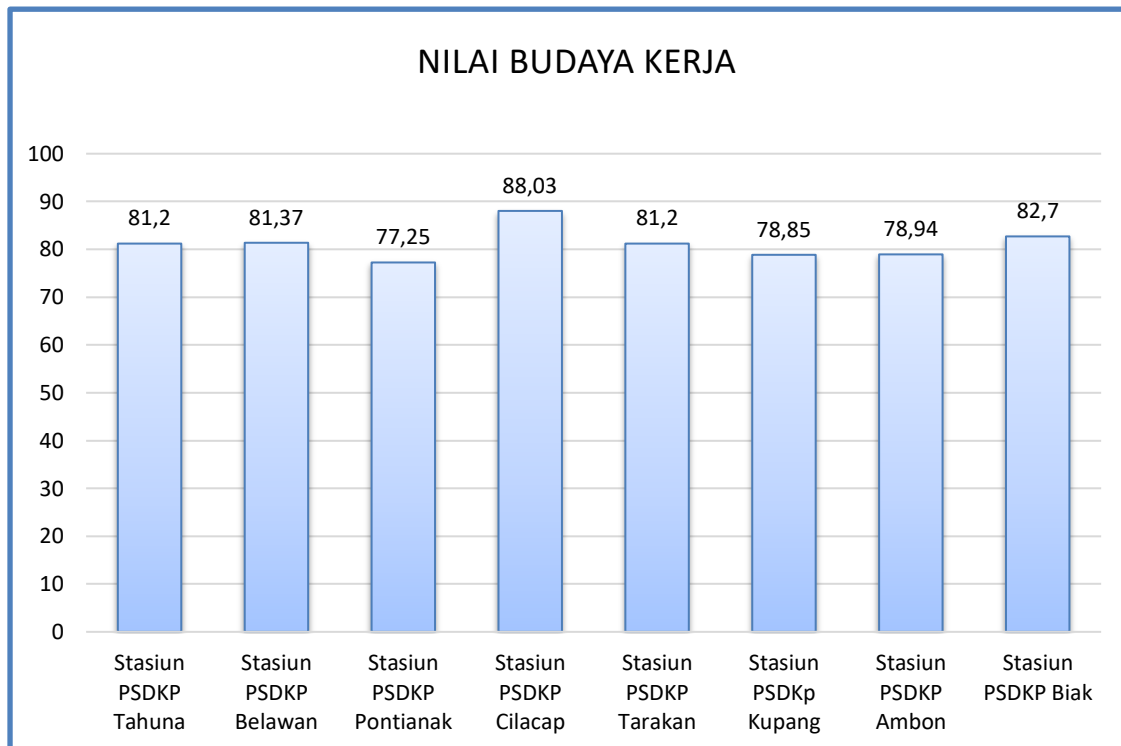
Indikator Sasaran Kinerja	2024		Persen	2025		Persen
	T	C		T	C	
Nilai Implementasi Program Budaya Kerja	70,00	81,24	116,06	70,00	81,20	116,00

Berdasarkan informasi tabel diatas, target yang ditetapkan pada tahun 2025 dengan target nilai sebesar 70,00 telah tercapai dengan nilai sebesar 81,20 dan persentase pada aplikasi Kinerjaku sebesar 116,00 dengan predikat “Istimewa”. Apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2024 nilai capaian ISK tersebut mengalami sedikit penurunan, meskipun demikian nilai capaian ISK tersebut telah tercapai dengan baik dan telah melebihi nilai target pada setiap tahunnya.

Indikator keberhasilan ISK tersebut diukur dari tercapainya target pada komponen penilaian 1. Tim Satker; 2. Hasilkan Inovasi Unit Kerja (HIU); 3. Lima Menit Sebelum Jadwal; 4. Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin (5R); 5. Upayakan Data Terkini (UPDATE); 6. Organisasikan Rapat, Catat, Aksi, dan Arsipkan (ORCA); 7. Tegakkan Aturan dengan Akuntabel dan Transparan (TAAT); 8. Belanjakan Anggaran secara Realistis, Akuntabel, dan Amanah (BARRAKUDA); 9. ASN PSDKP Produktif Kerja (APIK); 10. Menyelesaikan Tugas dengan Tepat (MANTAP); 11. Hargai, Motivasi, dan Inisiatif (HARMONIS); dan 12. Gelorakan Gerakan Hemat Energi (*Go Green*).

Adapun perbandingan capaian kinerja “Nilai implementasi program budaya kerja” tahun 2025 dengan UPT sejenis dapat dilihat pada gambar sebagai berikut.

Gambar 27
Perbandingan Capaian “Nilai implementasi program budaya kerja” dengan
UPT Sejenis Tahun 2025



Berdasarkan perbandingan tersebut, Stasiun PSDKP Tahuna mendapatkan capaian lebih tinggi dari 3 UPT sejenis yaitu Stasiun PSDKP Ambon, Stasiun PSDKP Pontianak dan Stasiun PSDKP Kupang. Untuk Stasiun PSDKP Tarakan mendapatkan nilai yang sama serta mendapatkan nilai yang lebih rendah dari 3 UPT lainnya, yaitu Stasiun PSDKP Cilacap, Stasiun PSDKP Biak dan Stasiun PSDKP Belawan. Akan tetapi lebih rendah dari 3 UPT sejenis yaitu Stasiun PSDKP Cilacap, Stasiun PSDKP Kupang dan Stasiun PSDKP Biak. Diharapkan Stasiun PSDKP Tahuna dapat mempertahankan dan meningkatkan nilai capaian ISK “Nilai Implementasi Program Budaya Kerja” pada periode yang akan datang

C. Akuntabilitas Sumber Daya Manusia dan Keuangan

Dalam pembentukan UPT Stasiun PSDKP Tahuna melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2016, jumlah PNS UPT Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna berjumlah 8 (delapan) orang dan di Satwas SDKP Talaud berjumlah 1 (satu) orang. Sampai dengan awal tahun 2025, UPT Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna memiliki 36 (tiga puluh enam) ASN terdiri dari 25 (Dua Puluh Lima) PNS, 11 (Sebelas) PPPK, dan 10 (Sepuluh) Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP). Daftar Urut Kepangkatan (DUK) pegawai Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna telah terekam dalam aplikasi e-Pegawai KKP.

Informasi terkait komposisi, golongan, pangkat, pendidikan dan kualifikasi, lokasi penempatan ASN dan PPNPN dapat dilihat pada Tabel 53 dan 54 dibawah ini.

Tabel 53
Komposisi Golongan dan Kualifikasi Pendidikan ASN Stasiun
PSDKP Tahuna

No	Jabatan	Golongan			Jumlah	Kualifikasi Pendidikan					Jumlah
		I	II	III		S2	S1/ DIV	DIII	SMA / SMK / SUPM	SMP	
1	Kepala Stasiun	-	-	1	1	-	1	-	-	-	1
2	Ketua Tim Kerja	-	-	5	5	-	3	1	1	-	5
3	Pejabat Fungsional (Pengawas Perikanan)	-	5	1	6	-	1	3	2	-	6
4	Pelaksana	-	9	10	19	-	3	8	8	-	19

Tabel 54
Daftar PJLP di UPT Stasiun PSDKP Tahuna

No	Penempatan Kerja	Jumlah PPNPN/PJLP
1	Stasiun PSDKP Tahuna	9
2	Satwas SDKP Talaud	1
Jumlah		10

Nilai pagu anggaran Tahun 2025 yang telah dianggarkan untuk lingkup Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna sebesar Rp. 13.937.135.000,- dengan pagu real sebesar Rp. 12.690.766.000,- dimana sampai dengan akhir Tahun 2025,

terdapat realisasi anggaran senilai Rp. 12.659.396.766,- dari sisa pagu real dengan persentase (99,75)%. Adapun rincian realisasi untuk Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 55. berikut ini.

Tabel 55
Rincian Realisasi Tahun 2025 Stasiun PSDKP Tahuna

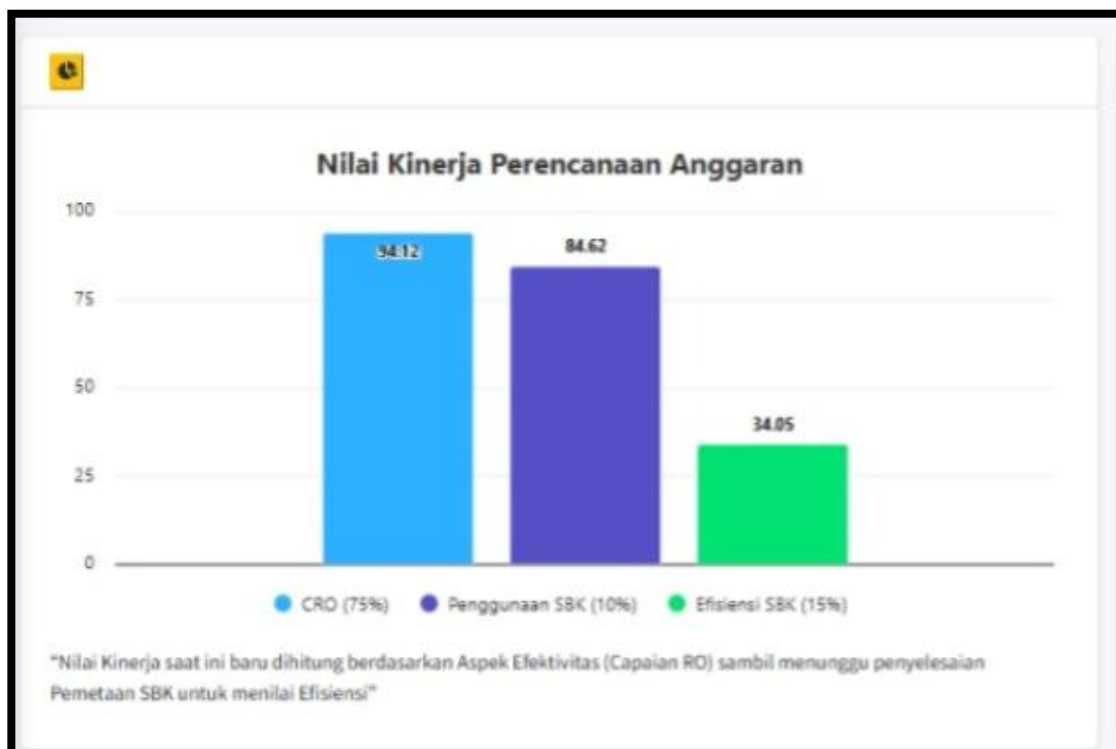
Kode	Kegiatan/Output	Pagu (Rp)	Pagu Real (Rp)	Realisasi (Rp.)	Persen
2350	Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan	7.617.497.000,-	6.706.917.000,-	6.691.816.019,-	99,77%
2351	Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	82.746.000,-	82.746.000,-	82.406.212,-	99,59%
2352	Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	105.320.000,-	105.320.000,-	105.304.447,-	99,99%
2355	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen PSDKP	6.131.572.000,-	5.797.783.000,-	5.779.870.088,-	99,73%
Total Anggaran dan Realisasi		13.937.135.000,-	12.690.766.000,-	12.659.396.766,-	99,75%

Pada kegiatan Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan telah tercapai realisasi sebesar Rp. 6.691.816.019,- dengan persentase 99,77% dari alokasi anggaran (real) sebesar Rp. 6.706.917.000,-. Pada kegiatan Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan telah tercapai realisasi sebesar Rp. 82.406.212,- dengan persentase 99,59% dari alokasi anggaran (real) sebesar Rp. 82.746.000,-. Dari kegiatan Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan telah tercapai realisasi sebesar Rp. 105.304.447,- dengan persentase 99,99% dari alokasi anggaran (real) sebesar Rp. 105.320.000,-. Dari kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen PSDKP telah tercapai realisasi sebesar Rp. 5.779.870.088,- dengan persentase 99,73% dari alokasi anggaran

(real) sebesar Rp. 5.797.783.000,-. Serapan anggaran pada Kode 2350, 2351, 2352, dan 2355 termasuk baik karena sesuai dengan target serapan anggaran Tahun 2025.

D. Analisis Efisiensi

Perhitungan efisiensi mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2021 tentang pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan rencana dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi keluaran anggaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran dengan capaian keluaran. Rata-rata efisiensi penggunaan sumber daya khususnya anggaran Stasiun PSDKP Tahuna berdasarkan data realisasi output KRO pada aplikasi MONEV Kementerian Keuangan sebesar 34,05. Berikut rincian hasil perhitungan nilai efisiensi berdasarkan aplikasi Monev :



Nilai Capaian RO (CRO) sebagai indikator efektifitas dengan bobot 75% memperoleh skor 94,12 yang menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan anggaran telah selaras dengan target output yang ditetapkan. Sementara itu, penggunaan SBK dengan bobot 10% mencapai nilai 84,62 menandakan kesesuaian yang cukup baik dalam penerapan Standar Biaya Keluaran sesuai ketentuan yang berlaku.

Namun demikian pada aspek Efisiensi SBK yang memiliki bobot 15% nilai yang diperoleh masih sebesar 34,05. Hal ini menunjukkan bahwa penilaian efisiensi belum optimal dan masih menggunakan penyelesaian proses pemetaan SBK sebagai dasar pengukuran yang lebih komprehensif. Secara keseluruhan, nilai kinerja perencanaan anggaran saat ini baru dihitung berdasarkan aspek efektifitas sementara penilaian efisiensi kan disempurnakan setelah proses pemetaan SBK selesai. Kondisi ini menjadi perhatian untuk peningkatan kualitas perencanaan anggaran kedepan agar tidak hanya efektif tetapi juga efisien.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

- a. Pelaksanaan tugas dan fungsi Stasiun PSDKP Tahuna berlandaskan pada tujuan, sasaran dan program kerja yang telah ditetapkan di dalam Renstra KKP, Renstra Ditjen PSDKP, dan kontrak kinerja antara Direktur Jenderal PSDKP (sebagai pemberi amanah) dengan Kepala Stasiun PSDKP Tahuna (sebagai penerima amanah) sebagai acuan dalam pencapaian kinerja yang telah ditetapkan.
- b. Sejalan dengan perkembangan kebijakan dan reformasi birokrasi di KKP, Stasiun PSDKP telah menetapkan 19 (Sembilan Belas) Indikator Sasaran Kinerja (ISK), dimana Stasiun PSDKP Tahuna telah mengidentifikasi menjadi 9 (Sembilan) IKU dan 10 (Sepuluh) IKM yang melekat pada 7 (Delapan) Sasaran Kegiatan pada Penetapan Kinerja Tahun Anggaran 2025.
- c. Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2025 Stasiun PSDKP Tahuna memberikan gambaran terhadap capaian kinerja sepanjang Tahun 2025, sebagai bahan evaluasi dan rencana tindak lanjut dalam rangka pencapaian kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025.
- d. Stasiun PSDKP Tahuna mendapatkan nilai kinerja pada Tahun 2025 sebesar 105,68 dengan predikat "Baik".

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi atas capaian kinerja pada Triwulan III Tahun 2025 dan evaluasi capaian kinerja pada Tahun 2025, sebagai upaya peningkatan kinerja berikutnya terdapat hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti. Rekomendasi dan tindak lanjut dapat dilihat pada Tabel 56. sebagai berikut:

Tabel 56
Tindak Lanjut Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2025

No	Hal yang Harus Diperbaiki	Tindak Lanjut	Hambatan
1.	Nilai survei kepuasan masyarakat yang lebih rendah dibandingkan dengan penilaian pada periode sebelumnya	Telah dilakukan perbaikan dengan meningkatkan pelayanan publik kepada pelaku usaha dengan memperhatikan kecepatan respon kepada pelaku usaha serta telah dilakukan Survey Kepuasan Masyarakat Periode TW IV yang mendapatkan nilai lebih baik dari Triwulan sebelumnya	Sering terjadi mati listik dan hilang jaringan yang menghambat petugas dalam kecepatan waktu pelayanan kepada pelaku usaha

Tabel 57
Rekomendasi Penutup dan Rencana Tindak Lanjut Capaian Kinerja Tahun 2025

No	Hal yang Harus Diperbaiki	Tindak Lanjut	Hambatan
1.	Nilai Indeks Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan tidak memenuhi target yang ditetapkan	Pada tahun 2026 akan dilakukan tindak lanjut berupa penyidikan dan melakukan pencarian DPO	Keterbatasan informasi dikarenakan ABK tersebut merupakan WNA

LAMPIRAN



26 KKP 2025

EKONOMI BIRU UNTUK
INDONESIA MAJU

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)

Unit Pelayanan Stasiun PSDKP Tahuna
Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Kementerian Kelautan dan Perikanan

Periode Triwulan IV Tahun 2025

Jenis Layanan :

Penerbitan Standar Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan

NILAI IKM 92,95 SANGAT BAIK

RESPONDEN

- Jumlah Responden** : 13
- Periode Survei** : Oktober - Desember 2025
- Lokasi Survei** : Stasiun PSDKP Tahuna
Satwas SDKP Talud

Terimakasih Atas Penilaian Yang Telah Diberikan



f Stasiun PSDKP Tahuna



PSDKP Tahuna

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520346
LAMAN www.kkp.go.id SUREL ditjenpsdkp@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
STASIUN PENGAWASAN SDKP TAHUNA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Martin Yermias Luhulima

Jabatan : Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahuna

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Pung Nugroho Saksono

Jabatan : Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 17 Maret 2025

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Pung Nugroho Saksono

PIHAK PERTAMA
Kepala Stasiun Pengawasan Sumber
Daya Kelautan dan Perikanan Tahuna

Martin Yermias Luhulima

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
STASIUN PENGAWASAN SDKP TAHUNA**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif	1. Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen kelautan [Nilai]	75
2.	Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan	2. Indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan (Indeks)	100
3.	Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan	3. Indeks pemeriksaan pelaku usaha perikanan (Indeks)	100
4.	Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif	4. Indeks operasi kapal pengawas (Indeks)	92
		5. Indeks operasi speedboat pengawas (Indeks)	92
5.	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	6. Persentase pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan SDKP (%)	100
6.	Terselenggaranya penanganan pelanggaran administratif bidang kelautan dan perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	7. Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (Indeks)	81
7.	Terselenggaranya penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	8. Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan [indeks]	94
8.	Tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	9. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker Stasiun PSDKP Tahuna (Nilai)	71,5
		10. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker lingkup Stasiun PSDKP Tahuna (Nilai)	92
		11. Indeks Profesionalitas ASN Stasiun PSDKP Tahuna (Indeks)	81
		12. Penilaian Mandiri SAKIP Satker Stasiun PSDKP Tahuna (nilai)	88
		13. Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis Manajemen Risiko unit kerja lingkup Stasiun PSDKP Tahuna (Persentase)	100

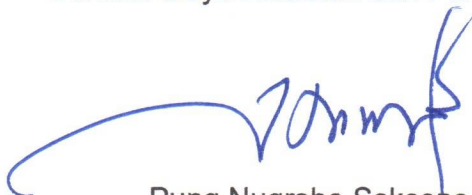
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		14. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan unit kerja lingkup Stasiun PSDKP Tahuna yang dokumen tindaklanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan [Persentase]	95
		15. Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik unit kerja lingkup Stasiun PSDKP Tahuna [Nilai]	88,5
		16. Nilai Minimal yang dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) unit kerja lingkup Stasiun PSDKP Tahuna [Nilai]	80
		17. Nilai pengawasan kearsipan internal Stasiun PSDKP Tahuna [Nilai]	80
		18. Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Stasiun PSDKP Tahuna [Unit]	1
		19. Nilai implementasi Program Budaya Kerja [Nilai]	70

Data Anggaran:

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	
	a. Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP	6.930.075.000
	b. Penanganan Pelanggaran Sektor Kelautan dan Perikanan	196.455.000
	c. Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	376.747.000
2.	Program Dukungan Manajemen	6.789.908.000
Total Anggaran Stasiun PSDKP Tahuna Tahun 2025		14.293.185.000

Jakarta, 17 Maret 2025

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



Pung Nugroho Saksono

PIHAK PERTAMA
Kepala Stasiun Pengawasan Sumber
Daya Kelautan dan Perikanan Tahuna



Martin Yermias Luhulima



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520346
LAMAN www.kkp.go.id SUREL ditjenpsdkp@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
STASIUN PENGAWASAN SDKP TAHUNA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jenlyf Jimmy Wuwung

Jabatan : Plt. Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahuna

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Pung Nugroho Saksono

Jabatan : Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 15 Desember 2025

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Pung Nugroho Saksono

PIHAK PERTAMA
Plt. Kepala Stasiun Pengawasan Sumber
Daya Kelautan dan Perikanan Tahuna

Jenlyf Jimmy Wuwung

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
STASIUN PENGAWASAN SDKP TAHUNA**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif	1. Nilai kualitas operasi intelijen kelautan	100
2.	Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan	2. Nilai kualitas pengawasan sumber daya kelautan	82
3.	Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan	3. Nilai kualitas pengawasan sumber daya perikanan	82
4.	Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif	4. Indeks operasi kapal pengawas	92
		5. Indeks kinerja operasi speedboat pengawas	92
		6. Persentase pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan SDKP	100
5.	Terselenggaranya penanganan pelanggaran administratif bidang kelautan dan perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	7. Indeks penganan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan	81
		8. Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan	81
6.	Terselenggaranya penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	9. Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan	81
7.	Tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	10. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker Stasiun PSDKP Tahuna;	71,5
		11. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker lingkup Stasiun PSDKP Tahuna;	92
		12. Indeks Profesionalitas ASN Stasiun PSDKP Tahuna;	81
		13. Penilaian Mandiri SAKIP Satker Stasiun PSDKP Tahuna;	86
		14. Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis Manajemen Risiko unit kerja lingkup Stasiun PSDKP Tahuna	100


NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		15. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan unit kerja lingkup Stasiun PSDKP Tahuna yang dokumen tindaklanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	95
		16. Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik unit kerja lingkup Stasiun PSDKP Tahuna	80
		17. Nilai pengawasan kearsipan internal Stasiun PSDKP Tahuna	75
		18. Nilai Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Stasiun PSDKP Tahuna	77
		19. Nilai implementasi Program Budaya Kerja	70

Data Anggaran:

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	
	a. Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP	7.617.497.000
	b. Penanganan Pelanggaran Sektor Kelautan dan Perikanan	82.746.000
	c. Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	105.320.000
2.	Program Dukungan Manajemen	6.131.572.000
Total Anggaran Stasiun PSDKP Tahuna Tahun 2025		13.937.135.000

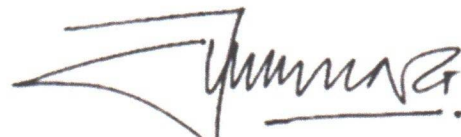
Jakarta, 15 Desember 2025

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



Pung Nugroho Saksono

PIHAK PERTAMA
Plt. Kepala Stasiun Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Tahuna



Jenlyf Jimmy Wuwung